# PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGs DI DAERAH (RAD MDGs)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2010

# PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGs DI DAERAH (RAD MDGs)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2010

# Kata Pengantar

Pencapaian target Milienium Development Goals (MDGs) merupakan pemenuhan komitmen internasional yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Laporan Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum ke-65 (*High-level Plenary Meeting on MDGS*) yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 September 2010 di New York mengungkapkan bahwa kinerja pencapaian target MDGs Indonesia telah sejalan dengan kinerja pencapaian target MDGs yang tercantum dalam Laporan Pencapaian MDGs Global Tahun 2010.

Meskipun kinerja pencapaian target MDGs di tingkat nasional sudah cukup baik, namun disparitas kinerja antarprovinsi dan kabupaten/kota masih sangat bervariasi. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama lintas sektor dan lintas bidang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, peningkatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta, serta peningkatan peran aktif masyarakat untuk menangani disparitas kinerja tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditugaskan untuk merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs, sebagaimana yang tercantum dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan terkait Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Untuk itu, Bappenas telah menyelesaikan penyusunan Peta Jalan (roadmap) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs, yang merupakan RAN MDGs. Peta Jalan tersebut selanjutnya merupakan acuan utama dalam penyusunan RAD MDGs, yang bertujuan untuk mendukung percepatan pencapaian target MDGs di daerah.

Pedoman Penyusunan RAD MDGs sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tersebut, berisikan cara pengorganisasian, langkah teknis, dan sistematika penyusunan RAD MDGs, serta dilengkapi pula dengan matriks rencana aksinya. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAD MDGs sehingga setiap daerah dapat menyusun dokumen strategis yang menggambarkan upaya sinergis dalam pencapaian target MDGs di pusat dan daerah.

Kami harapkan pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menyusun RAD MDGs yang berkualitas, untuk mendukung terlaksananya percepatan pencapaian MDGs di daerah dalam menyejahterakan masyarakat.

Jakarta, November 2010
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Armida S. Alisjahbana

# Daftar Isi

**Kata Pengantar** ..... **i**
**Daftar Isi** ..... **iii**
**Daftar Tabel** ..... **iv**
**Daftar Gambar** ..... **iv**
**Daftar Singkatan** ..... **v**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 3
1.2 Tujuan ..... 4
1.3 Ruang Lingkup ..... 4
1.4 Landasan Hukum ..... 4

**BAB II KETERKAITAN MDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN** ..... **9**
2.1 Keterkaitan MDGs dengan RPJMN ..... 11
2.2 Keterkaitan MDGs dengan Pembangunan Daerah ..... 12
2.3 Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait Percepatan Pencapaian Target MDGs ..... 13

**BAB III LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RAD MDGs** ..... **19**
3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs ..... 21
3.2 Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs ..... 23
3.3 Pembiayaan ..... 23
3.4 Jadwal Penyusunan RAD MDGs ..... 24

**BAB IV SISTEMATIKA RAD MDGs** ..... **25**
4.1 Sistematika Dokumen RAD MDGs ..... 27
4.2 Matrik RAD MDGs dan Penjelasannya ..... 29

**BAB V PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD MDGs** ..... **33**
5.1 Pengorganisasian ..... 35
5.2 Uraian Tugas ..... 37
5.3 Mekanisme Kerja ..... 37

**BAB VI PENUTUP** ..... **40**

## Lampiran

1. List Indikator MDGs ..... 45
2. Pencapaian Indikator MDGs Nasional ..... 49
3. Profil Pencapaian MDGs Provinsi ..... 55
4. Dokumen Kebijakan Lainnya yang Perlu diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs ..... 61
5. Contoh matrik masing-masing target MDGs
   a. Matrik Tujuan 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan); ..... 00
   b. Matrik Tujuan 2 (mencapai pendidikan dasar untuk semua); ..... 00
   c. Matrik Tujuan 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan); ..... 00
   d. Matrik Tujuan 4 (menurunkan angka kematian anak); ..... 00
   e. Matrik Tujuan 5 (meningkatkan kesehatan ibu); ..... 00
   f. Matrik Tujuan 6 (memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya); ..... 00
   g. Matrik Tujuan 7 (memastikan kelestarian lingkungan hidup). ..... 00

## Daftar Tabel

Tabel 1. Jadwal Penyusunan RAD MDGs..... 24
Tabel 2. Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs... 29
Tabel 3. Organisasi dan Tanggung Jawab Pokja Penyusunan RAD MDGs..... 36

## Daftar Gambar

Gambar 1. Integrasi MDGs dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan..... 12
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD MDGs..... 36

# Daftar Singkatan

| | | |
|---|---|---|
| APBD | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional |
| Inpres | : | Instruksi Presiden |
| KEK | : | Kekurangan Energi Kronis |
| K/L | : | Kementerian/Lembaga |
| LSM | : | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MDGs | : | *Millennium Development Goals* |
| Perpres | : | Peraturan Presiden |
| PNPM | : | Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat |
| PONED | : | Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar |
| PONEK | : | Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif |
| PP | : | Peraturan Pemerintah |
| PPN | : | Perencanaan Pembangunan Nasional |
| PUG | : | Pengarusutamaan Gender |
| RAD | : | Rencana Aksi Daerah |
| RAD MDGs | : | Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah |
| RAPBN | : | Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional |
| RENJA | : | Rencana Kerja |
| RENSTRA | : | Rencana Strategis |
| RENSTRA RKPD | : | Rencana Strategis RKPD |
| RKA-SKPD | : | Rencana Kerja Anggaran SKPD |
| RKP | : | Rencana Kerja Pemerintah |
| RKPD | : | Rencana Kerja Pemerintah Daerah |
| RPJMD | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RPJMN | : | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RPJPN | : | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional |
| SKPD | : | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| STBM | : | Sanitasi Total Berbasis Masyarakat |
| TKPK | : | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan |
| UMKM | : | Usaha Mikro Kecil Menengah |
| UU | : | Undang Undang |

# 1 PENDAHULUAN

# BAB 1
# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

*Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya lebih menyejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. 8 (delapan) tujuan (*goals*) menjadi komitmen MDGs mencakup: (1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua; (3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (4) Menurunkan Angka Kematian Anak; (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya; (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan (8) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat nasional, target-target MDGs telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Sebagian besar pencapaian MDGs Indonesia sudah sesuai dengan rencana target yang ditetapkan (*on track*), bahkan beberapa target MDGs 2015 telah tercapai seperti penurunan prevalensi kekurangan gizi dan proporsi penduduk dengan pendapatan per kapita (lihat Lampiran 2). Namun demikian, masih ada beberapa target MDGs yang memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Data capaian target MDGs untuk masing-masing provinsi yang disajikan pada

Lampiran 3 menunjukkan bahwa masih ditemukan disparitas pencapaian di tingkat provinsi. Sehubungan dengan itu, efektivitas program-program yang mendukung pencapaian MDGs di daerah juga perlu ditingkatkan.

Untuk mempercepat pencapaian target MDGs, Bappenas bersama dengan kementerian/lembaga telah merumuskan peta jalan (*road map*) nasional percepatan pencapaian MDGs. Selanjutnya *roadmap* tersebut perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah masing-masing.

Dengan rencana aksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di provinsi memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target MDGs di daerah.

## 1.2 Tujuan

Pedoman penyusunan RAD MDGs ditujukan untuk memberikan panduan bagi daerah, khususnya provinsi untuk menyusun dokumen rencana aksi percepatan pencapaian target MDGs di daerah, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan tentang :

1. Keterkaitan MDGs dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
2. Panduan pengorganisasian;
3. Langkah teknis dan jadwal penyusunan RAD MDGs;
4. Panduan penyusunan matrik RAD MDGs.

## 1.4 Landasan Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).**
   a. **Pasal 4 ayat (2)** : RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi,

dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

b. **Pasal 5 ayat (2)** : RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah**

   Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, gubernur memiliki tugas dan wewenang : a) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; b) koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan c) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Di samping pelaksanaan tugas tersebut gubernur sebagai wakil Pemerintah mempunyai tugas : a) menjaga kehidupan berbangsa, bernegara dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; c) memelihara stabilitas politik; dan d) menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

3. **Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014**

   Pasal 2 ayat 3 : RPJM Nasional berfungsi sebagai:

   a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
   b. Bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran

Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;

c. Pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah.

4. **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang RKP 2011**

   Pasal 2 ayat (2) : RKP tahun 2011 berfungsi sebagai:

   a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun 2011;
   b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011;
   c. Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2011.

5. **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010**

   a. Instruksi Pertama : "Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pelaksanaan Program 100 Hari Kabinet Bersatu Indonesia II, dan hasil Rapat Kerja antara Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 2-3 Februari 2010;
   b. Instruksi Kedua : "Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program : (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c) kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f) infrastruktur; (g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; (k) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; (l) prioritas lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan; (m) prioritas lainnya di bidang perekonomian, dan (n) prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

6. **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan**

   a. Instruksi Pertama : "Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka

pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden, yang meliputi :

1. Pro rakyat;
2. Keadilan untuk semua (*justice for all*);
3. Pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals* – MDGs).

b. Instruksi Kedua poin 3 : Untuk program pencapaian tujuan pembangunan Milenium, memfokuskan pada : (a) program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; (b) program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (c) program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (d) program penurunan angka kematian anak; (e) program kesehatan ibu; (f) program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (g) program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; dan (h) program pendukung percepatan pencapaian tujuan milenium.

# 2 KETERKAITAN MDGs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

# BAB 2
# Keterkaitan MDGs dengan Kebijakan Pembangunan

## 2.1. Keterkaitan MDGs dengan RPJMN

MDGs bukan hanya merupakan pemenuhan komitmen internasional tetapi merupakan penajaman upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, MDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.

RPJMN merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah (5 tahun) yang menjadi acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Selanjutnya, penerapan RPJMN dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Disamping itu, RPJMN juga menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

RPJMN tahun 2010-2014 merupakan paruh waktu kedua sejak tahun 2000 bagi upaya pencapaian tujuan MDGs pada tahun 2015 dan merupakan kesempatan terakhir (*last shot*) bagi percepatan pencapaian tujuan MDGs secara sistematis. Pengarusutamaan pencapaian tujuan MDGs ke dalam RPJMN tahun 2010-2014 dan RKP, telah dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, penetapan program/kegiatan, sasaran, indikator dan target terukur serta jaminan penyediaan sumber pembiayaannya. Gambaran umum internalisasi MDGs dalam pembangunan nasional dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.

**Gambar 1.** Integrasi MDGs dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

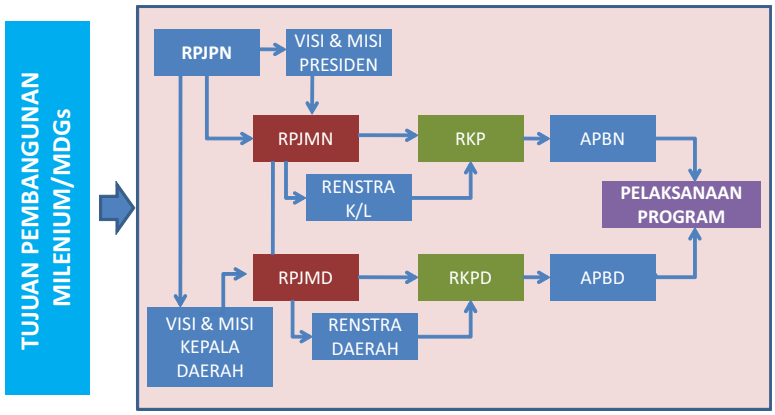


## 2.2. Keterkaitan MDGs dengan Rencana Pembangunan Daerah

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional, pengarusutamaan MDGs juga harus dilakukan dalam proses perencanaan di tingkat daerah. Pengarusutamaan MDGs dalam pembangunan daerah diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah.

Dengan mengacu pada RPJMN, target dan indikator MDGs diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah, yaitu RPJMD dan Renstra SKPD. Berbagai langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi antara lain adalah:

(1) Bagi Pemerintah Provinsi yang telah menyusun RPJMD, pencapaian target MDGs tingkat nasional dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan ke dalam RKPD. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja SKPD dan RKA-SKPD memuat program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian MDGs.

(2) Bagi Pemerintah Provinsi yang sedang menyusun RPJMD, pencapaian target MDGs tingkat daerah dilakukan dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang terukur disertai dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program ke dalam dokumen RPJMD. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga mengarahkan penyusunan Renstra SKPD agar memuat kebijakan, program dan kegiatan yang terukur dalam mendukung pencapaian MDGs dan dilengkapi dengan capaian, indikator kinerja dan pendanaan untuk setiap program

dan kegiatan. Pemerintah Provinsi juga mengarahkan dan memastikan bahwa penyusunan Renja SKPD dan RKA-SKPD memuat program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian MDGs. Melalui cara ini pencapaian target MDGs tingkat nasional dapat diwujudkan.

(3) Pemerintah Provinsi hendaknya juga memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPD Kabupaten/Kota agar setiap kebijakan, program dan kegiatan SKPD Kabupaten/Kota benar-benar mendukung pencapaian MDGs tingkat provinsi.

## 2.3. Kebijakan RPJMN 2010-2014 Terkait Percepatan Pencapaian Target MDGs

### 1. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan dan Kelaparan

**1.1. Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan (Tujuan 1A)** diarahkan untuk:

a. Meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan kemiskinan;
b. Melengkapi dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat;
b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah.

**1.2. Kebijakan dan Strategi dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Penuh dan Produktif dan Pekerjaan yang Layak untuk Semua, termasuk Perempuan dan Kaum Muda (Tujuan 1B)** diarahkan untuk: (a) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya melalui investasi dan perluasan usaha; (b) memperbaiki kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; (c) menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; (d) meningkatkan kualitas pekerja; (e) meningkatkan produktivitas pekerja pertanian; (f) mengembangkan jaminan sosial dan memberdayakan pekerja; (g) menerapkan peraturan ketenagakerjaan utama. Upaya penciptaan kesempatan kerja formal seluas-luasnya ini dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga, serta didukung oleh pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sektor perbankan, dunia usaha, dan masyarakat.

1.3. **Kebijakan dan Strategi Penurunan Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita (Tujuan 1C),** melalui: perbaikan status gizi masyarakat dengan meningkatkan: (a) asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) dan zat gizi mikro (kapsul Vitamin A, zat besi (Fe), garam beryodium, dan zat gizi mikro lainnya) untuk memenuhi angka kecukupan gizi; (b) survailans pangan dan gizi; (c) pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang; (d) pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan; (e) pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai dari bayi usia 6–24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK; (f) pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama; (g) kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; (h) fortifikasi; (i) pemberian makanan pemulihan balita gizi-kurang; (j) penanggulangan gizi darurat; (k) tatalaksana penanganan gizi buruk anak balita (0–59 bulan); dan (l) peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi.

2. **Kebijakan dan Strategi Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua (Tujuan 2),** melalui: (a) penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu dan terjangkau; (b) pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (c) penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang; (d) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (e) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/sederajat; (f) peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (g) penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, entrepreneurial, dan menyenangkan; (h) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*); (i) peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; (j) penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal; (k) peningkatan keberaksaraan penduduk

yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca; (l) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah; (m) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; serta (n) peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk manajemen berbasis sekolah (MBS).

3. **Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Tujuan 3),** diarahkan pada: (1) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; (2) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan; dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga.

   Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, maka strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender meliputi empat bidang, yaitu:

   a. Bidang pendidikan, melalui:
      - Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi;
      - Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal yang responsif gender.

   b. Bidang ketenagakerjaan, melalui:
      - Pengutamaan penegakan hukum yang ada untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mampu berpartisipasi tanpa diskriminasi dalam angkatan kerja;
      - Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam penegakan undang-undang dan peraturan

ketenagakerjaan;

- Penguatan pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan terlaksananya pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan (*core labor standards*) dengan lebih baik;
- Pengupayaan perlindungan sosial bagi kelompok perempuan yang bekerja di kegiatan ekonomi informal;
- Peningkatan kualitas pekerja dan calon tenaga kerja perempuan.

c. Bidang politik, melalui peningkatan pendidikan dan partisipasi politik untuk perempuan.

d. Pelaksanaan pengarusutamaan gender pada penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui pengembangan pedoman umum untuk SKPD dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, implementasi, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat lokal, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

4. **Kebijakan dan Strategi Penurunan Kematian Anak (Tujuan 4), melalui :** (a) peningkatan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; (b) peningkatan cakupan kunjungan bayi; (c) peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; (d) perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil; (e) pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan; (f) peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak; (g) penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader); dan (h) perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita.

5. **Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kesehatan Ibu (Tujuan 5),** melalui: (a) peningkatan pelayanan *continuum care* kesehatan ibu dan anak; (b) penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONED dan PONEK; (c) peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; (d) peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); (e) peningkatan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; (f) peningkatan cakupan penanganan komplikasi kebidanan pelayanan nifas; (g) peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah; (h) pemberian makanan pemulihan pada ibu hamil KEK; (i) pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; dan (j) promosi dan penggerakan masyarakat.

6. **Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penyakit Menular (Tujuan 6),** melalui: (a) peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, termasuk imunisasi; (b) penguatan survailans epidemiologi dalam rangka mengembangkan sistem kewaspadaan dini dengan didukung oleh peningkatan jumlah dan kualitas tenaga survailans; (c) penguatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); (d) penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; (e) peningkatan upaya menuju eliminasi penyakit-penyakit terabaikan; (f) penguatan sistem pengendalian zoonosis secara terpadu; dan (g) promosi dan pemberdayaan masyarakat.

7. **Kebijakan dan Strategi dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (Tujuan 7),** melalui: (a) memantapkan status hukum dan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan; (b) memantapkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya hutan; (c) memelihara dan meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan; (d) memantapkan fungsi konservasi alam dengan peningkatan kualitas pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi lainnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan tumbuhan dan satwa liar (TSL); (e) meningkatkan perlindungan hutan melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai ancaman (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL illegal); (f) meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi melalui peningkatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, kemandirian dan produktivitas, (g) mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik skala memengah dan besar; (h) mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, dengan penanamanya pada wilayah-wilayah yang memiliki lahan tidak terpakai namun luas dan memiliki potensi produksi pertanian yang tinggi; (i) pengendalian dan pemantauan pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati (kehati); (j) perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; (k) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup; (l) pengembangan penelitian pengelolaan lingkungan; (m) pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif; (n) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan; (o) meningkatkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia pangan dunia; (p) meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); (q) meningkatkan prioritas pembangunan, sistem perencanaan, pengembangan alternatif sumber pendanaan dan kinerja manajemen pembangunan air minum dan snitasi; (r) melengkapi perangkat peraturan di tingkat pusat dan/atau daerah untuk mendukung pelayanan air minum dan sanitasi; (s) memastikan ketersediaan air baku air minum; (t) meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau yang didukung oleh ketersediaan prasarana sarana dasar permukiman.

# 3 LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PENYUSUNAN RAD MDGs

# BAB 3
# Langkah Teknis dan Jadwal Penyusunan RAD MDGs

## 3.1. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs

Penyusunan RAD MDGs perlu mengacu pada beberapa dokumen yang terkait, antara lain :

1. **RPJMN Tahun 2010-2014**
   Dokumen RPJMN 2010-2014 diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan prioritas yang dilakukan terkait dengan percepatan pencapaian target MDGs. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pencapaian MDGs.

2. **Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014**
   Dokumen Renstra K/L tahun 2010-2014 yang terkait langsung dengan MDGs diperlukan dalam penyusunan program dan kegiatan serta tindakan yang dilakukan dengan percepatan pencapaian target MDGs. Program, kegiatan dan tindakan yang ada dalam Renstra bersifat lebih teknis dan rinci bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2010-2014. Dokumen tersebut juga telah selaras dengan target pembangunan dalam RPJMN tahun 2010-2014.

3. **RKP Tahun 2011**
   Dokumen RKP tahun 2011 diperlukan dalam penetapan indikator, target, dan anggaran tahun 2011. Perbaikan target dan anggaran tahun 2011 dalam RPJMN 2010-2014 diakomodasi dalam RKP tahun 2011 termasuk di dalamnya perbaikan indikator, target, dan anggaran terkait pencapaian target MDGs.

4. **Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan**
   Dokumen Inpres No. 3 Tahun 2010 diperlukan sebagai dasar hukum dalam penyusunan RAD MDGs.

5. **Peta Jalan (*Road Map)* Nasional Percepatan Pencapaian Target MDGs**
   Peta Jalan Nasional Percepatan Pencapaian target MDGs adalah dokumen yang menelaah kemajuan, menganalisis kecenderungan dan tantangan, serta mengkaji kebijakan dan kegiatan pokok untuk pencapaian MDGs. Peta jalan MDGs ini, mengacu pada RPJMN tahun 2010-2014 sebagai penjabaran dari Visi-Misi, dan Program Pemerintah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN tahun 2005-2025.

6. **Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010**
   Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010 merupakan laporan yang secara rinci menguraikan pencapaian sasaran pembangunan, sesuai dengan indikator MDGs sampai dengan posisi tahun 2010. Berdasarkan capaian tersebut, laporan ini menguraikan secara sekilas tantangan yang dihadapi serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai berbagai sasaran MDGs, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang diperlukan agar sasaran MDGs pada tahun 2015 dapat tercapai.

7. **Dokumen Kebijakan Lain yang Terkait**
   Beberapa K/L mengembangkan kebijakan terkait percepatan pencapaian target MDGs baik dalam bentuk UU, Inpres, dokumen rancang bangun maupun dokumen rencana aksi. Kebijakan tersebut diperlukan sebagai dasar hukum dalam penyusunan RAD dan rujukan dalam penetapan program dan kegiatan dalam Percepatan Pencapaian Target MDGs. Beberapa dokumen kebijakan lain yang terkait tersebut seperti pada lampiran 4.

8. **RPJMD**
   Dokumen RPJMD diperlukan dalam penyusunan RAD MDGs terutama kebijakan daerah yang relevan dan mendukung pencapaian target MDGs di masing-masing daerah.

## 3.2. Langkah-langkah Teknis Penyusunan RAD MDGs

Penyusunan RAD MDGs dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah 1 : Penetapan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja). Tim dapat menggunakan struktur yang ada atau membentuk yang baru, Tim beranggotakan Bappeda kabupaten;

Langkah 2 : Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas langkah-langkah penyusunan RAD;

Langkah 3 : Masing-masing pokja menyusun draft RAD, dengan tahapan:

1. Identifikasi tujuan, target dan indikator MDGs untuk masing-masing provinsi;
2. Menetapkan program dan kegiatan/tindakan prioritas terkait dengan pencapaian masing-masing target MDGs;
3. Menetapkan indikator dan target pencapaiannya terkait dengan kegiatan/tindakan yang dilakukan dalam pencapaian masing-masing target MDGs;
4. Menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukan.

Langkah 4 : Melaksanakan Sidang Pleno Kedua antarpokja dengan menyajikan draft RAD (narasi dan matrik) untuk dibahas secara lintaspokja (workshop);

Langkah 5 : Penyempurnaan dan finalisasi Draft RAD berdasarkan masukan hasil Sidang Pleno Kedua;

Langkah 6: Review draft RAD MDGs oleh tim MDGs pusat;

Langkah 7 : Pengesahan RAD MDGs dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah;

Langkah 8 : Sosialisasi RAD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Proses penyusunan RAD MDGs akan difasilitasi oleh Tim MDGs pusat.

## 3.3. Pembiayaan

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyiapan dan pelaksanaan RAD MDGs menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

## 3.4. Jadwal Penyusunan RAD MDGs

**Tabel 1.** Jadwal Penyusunan RAD MDGs

| No. | Kegiatan | Bulan Pada Tahun 2011 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) | √ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Draft RAD oleh Masing-masing Pokja*) (Workshop I) | | √ | | | | | | | | | | |
| 3 | Penyusunan Draft RAD oleh Masing-masing Pokja (provinsi dan kabupaten/kota) | | | √ | √ | √ | √ | | | | | | |
| 4 | Sidang Pleno Pembahasan RAD Hasil Masing-masing Pokja*) (Workshop II) | | | | √ | √ | √ | √ | | | | | |
| 5 | Penyempurnaan Draft RAD MDGs oleh Masing-masing Pokja | | | | | | | √ | | | | | |
| 6 | Review Draft RAD MDGs provinsi oleh Tim MDGs Pusat | | | | | | | √ | √ | √ | | | |
| 7 | Pengesahan RAD MDGs oleh Kepala Daerah | | | | | | | | | √ | √ | | |
| 8 | Sosialisasi RAD MDGs | | | | | | | | | | √ | √ | √ |

*) dengan mengundang Bappeda dan SKPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

# 4 SISTEMATIKA RAD MDGs

# BAB 4
# Sistematika RAD MDGs

## 4.1. Sistematika Dokumen RAD MDGs

Dokumen RAD MDGs akan berisi :

**BAB I Pendahuluan**
**1.1 Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah**
**1.2 Permasalahan dan Tantangan**

**BAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs**

**BAB III Pemantauan dan Evaluasi**

**BAB IV Penutup**

**Lampiran**
Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs

Penjelasan penulisan :

1. **BAB I Pendahuluan**
   1.1. **Kondisi Umum Pembangunan Daerah berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium**
   Pada bagian ini dijelaskan status capaian dari berbagai indikator terkait MDGs pada provinsi yang bersangkutan mulai *goal* 1 sampai dengan *goal* 7.
   1.2. **Permasalahan dan Tantangan**

Pada bagian ini dijelaskan secara umum permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang terkait dengan pencapaian target MDGs.

2. **BAB II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs**

   Pada bagian ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs. Dituliskan strategi umum yang dilakukan untuk masing-masing tujuan (*goal*) sebagai payung kegiatan yang dicontohkan dalam matrik. Strategi dirumuskan mengacu pada kegiatan nasional sebagaimana dituliskan dalam peta jalan (*roadmap*) nasional percepatan pencapaian MDGs dan RPJMD. Uraian kebijakan dan strategi dilengkapi dengan program, lintasprogram dan indikator kinerja *output* untuk masing-masing kegiatan dalam program tersebut.

3. **BAB III Pemantauan dan Evaluasi**

   Pada bagian ini disusun mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk melihat target capaian dari pelaksanaan RAD MDGs untuk masing-masing *goal* (tujuan).

   Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD MDGs perlu menggambarkan :

   a. Tanggungjawab masing-masing SKPD sesuai tujuan MDGs-nya;
   b. Waktu pelaksanaan;
   c. Langkah tindak lanjut;

   Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD MDGs dilakukan oleh Kepala Bappeda.

4. **BAB IV Penutup**

   Pada bagian ini diisikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAD MDGs, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak.

### 4.2. Matriks RAD MDGs dan Penjelasannya

RAD MDGs dituliskan dalam matriks berikut :

**Tabel 2.**
Matrik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs

**TUJUAN 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan**

| Program/ Kegiatan/ Tindakan | Indikator | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| **TARGET 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015** | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator MDGs :** | **1. Prevalensi balita kekurangan gizi** | | | | | | | | | | | | |
| | **2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum** | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat** | **1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan** | **100** | **100** | **100** | **100** | **-** | **536,0** | **564,0** | **643,0** | **668,0** | **-** | **APBN** | **Kementerian Kesehatan** |
| | **2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)** | **70** | **75** | **80** | **85** | **-** | | | | | | | |
| **Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kagiatan 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kagiatan 2** | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |

BAG I Target dan Indikator MDGs

BAG II Program dan Kegiatan Nasional

BAG III Kegiatan Daerah

**Petunjuk Umum Pengisian Matrik RAD MDGs**

1. Matrik ini berlaku untuk setiap *goal* dalam MDGs sepanjang target bersifat kuantitatif dan pencapaiannya secara nasional merupakan akumulasi dari pencapaian masing-masing provinsi. Untuk target yang tidak dapat dirumuskan secara kuantitatif dapat menggunakan target yang bersifat kualitatif dan dapat dituangkan dalam matrik yang disesuaikan atau dapat ditulis secara naratif**.**

2. Menu kegiatan daerah telah disiapkan oleh pusat (K/L terkait) sesuai tanggung jawab *goal*nya masing-masing sebagai acuan penyusunan RAD masing-masing provinsi. Menu kegiatan tersebut bersifat operasional dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah sepanjang memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian target nasional maupun target MDGs.

3. Matrik yang telah dilengkapi dengan menu kegiatan daerah akan disampaikan pada saat sosialisasi dan fasilitasi Pedoman Penyusunan RAD MDGs.

4. Cara Pengisian Matrik

   **a. Bagian 1 :**
   Diisi dengan target dan indikator MDGs sesuai tujuan/*goal* terkait.

   **a. Bagian 2 :**
   - Diisi dengan program, kegiatan, indikator, target pencapaian dan alokasi anggaran tahunan sesuai tujuan, target dan indikator MDGs terkait, mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan/atau RKP 2011;
   - Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber pembiayaan (APBN);
   - Kolom Pelaksana : diisi dengan K/L penanggung jawab kegiatan.

   **b. Bagian 3 :**
   - Diisi dengan kegiatan, indikator, target pencapaian dan alokasi anggaran tahunan dalam rangka mendukung pencapaian target nasional dan target MDGs terkait yang mengacu pada RPJMD;
   - Kolom program/kegiatan : diisi dengan program dan kegiatan

yang sesuai dengan pencapaian target nasional dan MDGs;

- Kolom Indikator : diisi dengan satuan target masing-masing kegiatan (jumlah, persentase atau yang bersifat kuantitatif);
- Kolom target pencapaian : diisi dengan target rencana tahunan capaian masing-masing indikator kegiatan;
- Kolom alokasi anggaran : diisi dengan rencana pembiayaan tahunan untuk masing-masing kegiatan;
- Kolom sumber pendanaan : diisi dengan sumber biaya untuk kegiatan untuk kegiatan pencapaian target MDGs yang berasal dari APBN (dana Dekon, TP, DAK, DAU) dan/atau APBD (PAD), dan/atau sumber lainnya;
- Kolom pelaksana : diisi dengan SKPD terkait pelaksana kegiatan.

# 5 PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD MDGs

# BAB 5
# Pengorganisasian Penyusunan RAD MDGs

## 5.1. Pengorganisasian

Organisasi penyusunan RAD MDGs terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja untuk masing-masing bidang, dengan tugas dan susunan anggota sebagai berikut :

1. **Tim Pengarah**
   Tim Pengarah terdiri dari unsur pimpinan daerah yang memberikan arahan terhadap penyusunan RAD.
   Susunan Tim Pengarah terdiri atas :
   - Penanggung Jawab : Kepala Daerah
   - Sekretaris : Kepala Bappeda
   - Anggota : Kepala Dinas Teknis Terkait

2. **Kelompok Kerja**
   Kelompok Kerja merupakan tim teknis yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan RAD. Organisasi masing-masing kelompok Kerja terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
   Kelompok Kerja RAD terdiri dari :
   - Pokja I : Penanggulangan Kemiskinan
   - Pokja II : Pendidikan dan Gender
   - Pokja III : Kesehatan dan Gizi
   - Pokja IV : Kelestarian Lingkungan Hidup

Pembentukan pokja dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pembahasan RAD MDGs. Namun demikian pembentukan pokja bukan

merupakan keharusan sepanjang di provinsi yang bersangkutan sudah memiliki pokja terkait.

**Tabel 3.** Organisasi dan Tanggung Jawab Pokja Penyusunan RAD MDGs

| Nama Pokja | Tanggung Jawab Per Tujuan MDGs | ORGANISASI POKJA (Indikatif) |
|---|---|---|
| **POKJA I** Penanggulangan Kemiskinan | Tujuan 1 | • Ketua: Kepala Bappeda/BPMD<br>• Sekretaris: Kepala Dinas Terkait<br>• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM) |
| **POKJA II** Pendidikan dan Gender | Tujuan 2<br>Tujuan 3 | • Ketua: Kepala Dinas Pendidikan<br>• Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait<br>• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM) |
| **POKJA III** Kesehatan dan Gizi | Tujuan 1,<br>Tujuan 4,<br>Tujuan 5,<br>Tujuan 6,<br>Tujuan 7 | • Ketua: Kepala Dinas Kesehatan<br>• Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait<br>• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM) |
| **POKJA IV** Kelestarian Lingkungan Hidup | Tujuan 7 | • Ketua: Kepala Dinas Pekerjaan Umum<br>• Sekretaris: Kepala Bidang Bappeda terkait<br>• Anggota: Kepala Dinas/Instansi terkait (Badan Lingkungan Hidup Daerah/BLHD, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Kantor Statistik Provinsi, LSM) |

**Gambar 2.** Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD MDGs

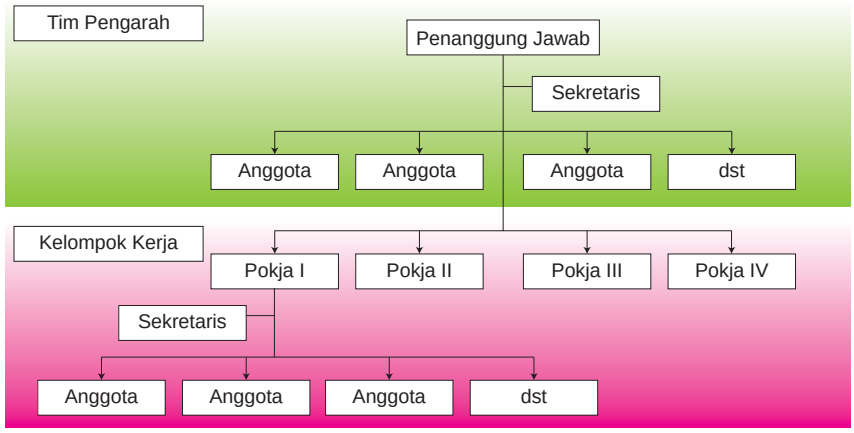

## 5.2. Uraian Tugas

1. Tim pengarah :
   a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman RAD MDGs;
   b. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis (Kelompok Kerja) mengenai substansi penyusunan pedoman RAD MDGs;
   c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk penyusunan pedoman RAD MDGs;
   d. menyampaikan laporan kegiatan penyusunan pedoman RAD MDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;

2. Kelompok Kerja :
   b. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
   c. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
   d. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan RAD MDGs;
   e. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian MDGs di tingkat provinsi dan upaya-upaya yang telah dilakukan;
   f. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
   g. menyusun RAD MDGs sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;
   h. sosialisasi RAD MDGs kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

## 5.3. Mekanisme Kerja

1. Tim pengarah mengadakan rapat sesuai keperluan selama penyusunan RAD MDGs;
2. Pokja mengadakan rapat sesuai dengan keperluan selama penyusunan RAD MDGs;

3. Kepala Bappeda sebagai sekretaris tim pengarah bertugas untuk mengkonsolidasikan RAD MDGs hasil pokja;
4. Draft yang sudah disusun oleh tim MDGs di tingkat provinsi akan dikonsultasikan dengan tim MDGs di tingkat pusat sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

# 6 PENUTUP

# BAB 6
# Penutup

Pedoman penyusunan RAD MDGs merupakan panduan bagi setiap pimpinan daerah untuk menghasilkan rancangan RAD MDGs yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang mengatur Pedoman Penyusunan RAD MDGs. Dengan pedoman ini diharapkan daerah dapat menyusun Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Target MDGs dengan standar kualitas yang baik dan dapat memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasinya.

# LAMPIRAN

1. **List Indikator MDGs**
2. **Pencapaian Indikator MDGs Nasional**
3. **Profil Pencapaian MDGs Provinsi**
4. **Dokumen Kebijakan Lainnya yang Perlu diperhatikan dalam Penyusunan RAD MDGs**
5. **Contoh matrik masing-masing target MDGs**
   a. Matrik Tujuan 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan)
   b. Matrik Tujuan 2 (mencapai pendidikan dasar untuk semua)
   c. Matrik Tujuan 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan)
   d. Matrik Tujuan 4 (meningkatkan kesehatan anak)
   e. Matrik Tujuan 5 (menurunkan angka kematian ibu)
   f. Matrik Tujuan 6 (memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya)
   g. Matrik Tujuan 7 (memastikan kelestarian lingkungan hidup)

**Lampiran 1 :**
List Indikator MDGs

| Tujuan dan Target (diambil dari Deklarasi Milenium) | Indikator capaian yang dimonitor |
|---|---|
| **Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan** | |
| **Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015** | 1.1 Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari<br>1.2 Rasio kesenjangan kemiskinan<br>1.3 Proporsi kuintil termiskin dalam konsumsi nasional |
| **Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda** | 1.4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja<br>1.5 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas<br>1.7 Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja |
| **Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015** | 1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi<br>1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum |
| **Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua** | |
| **Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar** | **2.1** Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar<br>**2.2** Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar<br>**2.3** Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki |
| **Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** | |
| **Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015** | 3.1 Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi<br>3.2 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian<br>3.3 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR |
| **Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak** | |
| **Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015** | 4.1 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup<br>4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup<br>4.3 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak |

| Tujuan dan Target (diambil dari Deklarasi Milenium) | Indikator capaian yang dimonitor |
|---|---|
| **Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu** | |
| **Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015** | 5.1 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup<br>5.2 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih |
| **Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015** | 5.3 Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)<br>5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun<br>5.5 Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan)<br>5.6 Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) |
| **Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya** | |
| **Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015** | 6.1 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-24 tahun<br>6.2 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir<br>6.3 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS |
| **Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010** | 6.5 Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral |
| **Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015** | 6.6 Angka kejadian dan tingkat kematian Malaria<br>6.7 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida<br>6.9 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis<br>6.10 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS |
| **Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup** | |
| **Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan** | 7.1 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan<br>7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)<br>7.3 Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) |

| Tujuan dan Target (diambil dari Deklarasi Milenium) | Indikator capaian yang dimonitor |
|---|---|
| **Target 7B: Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010** | 7.6 Proporsi kawasan lindung dan kawasan lindung perairan |
| **Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015** | 7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak<br>7.9 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak |
| **Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020** | 7.10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan |
| **Tujuan 8: Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan** | |
| **Target 8A: Mengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif**<br><br>Meliputi komitmen pada tata pemerintahan yang baik, pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan – baik di tingkat Nasional maupun Internasional | 8.1 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB<br>8.2 Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum<br>8.3 Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR |
| **Target 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang** | 8.12 Rasio pembayaran pokok utang dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor (DSR) |
| **Target 8F: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi** | 8.14 Proporsi penduduk yang memiliki jaringan PSTN per 100 penduduk<br>8.15 Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler per 100 penduduk<br>8.16 Proporsi rumah tangga dengan akses internet |

**Lampiran 2 :**
Pencapaian Indikator MDGs Nasional
Tinjauan Status Pencapaian Target MDGs

| Indikator | | Acuan Dasar | Saat Ini | Target MDGs 2015 | Status | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan** | | | | | | |
| ***Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015*** | | | | | | |
| 1.1 | Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari | 20,60% (1990) | 5,90% (2008) | 10,30% | ● | Bank Dunia dan BPS |
| 1.1a | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional | 15,10% (1990) | 13,33% (2010) | 7,55% | ▼ | Susenas, BPS |
| 1.1b | Persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 2,00 (PPP) per hari | 50,50% (1996) | 42,60% (2008) | Berkurang | ▶ | Bank Dunia dan BPS |
| 1.2 | Indeks Kedalaman Kemiskinan | 2,70% (1990) | 2,21% (2010) | Berkurang | ▶ | Susenas, BPS |
| ***Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda*** | | | | | | |
| 1.4 | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja | 3,52% (1990) | 2,24% (2009) | - | | |
| 1.5 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas | 65% (1990) | 62% (2009) | Meningkat | | Sakernas, BPS Produk Domestik Bruto (PDB nasional BPS) |
| 1.7 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | 71% (1990) | 64% (2009) | Menurun | ▶ | |
| ***Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015*** | | | | | | |
| 1.8 | Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi | 31,00% (1989)* | 18,40% (2007)** | 15,50% | ▶ | * Susenas , BPS **Riskesdas 2007, |
| 1.8a | Prevalensi balita gizi buruk | 7,20% (1989)* | 5,40% (2007)** | 3,60% | ▶ | |
| 1.8b | Prevalensi balita gizi kurang | 23,80% (1989)* | 13,00% (2007)** | 11,90% | ▶ | |
| 1.9 | Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: | | | | ▼ | Susenas, BPS |
| | - 1400 Kkal/kapita/hari | 17,00% (1990) | 14,47% (2009) | 8,50% | | |
| | - 2000 Kkal/kapita/hari | 64,21% (1990) | 61,86% (2009) | 35,32% | | |

| Indikator | | Acuan Dasar | Saat Ini | Target MDGs 2015 | Status | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua** | | | | | | |
| ***Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar*** | | | | | | |
| 2.1 | Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar | 88,70% (1992) | 95,23% (2009) | 100,00% | ▶ | Kemdiknas |
| 2.2. | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | 62,00% (1990)* | 93,00% (2008)** | 100,00% | ▶ | *Kemdiknas ** Susenas, BPS |
| 2.3 | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | 96,60% (1990) | 99,47% (2009) Perempuan: 99,40% Laki-laki: 99,55% | 100,00% | ▶ | Susenas, BPS |
| **Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** | | | | | | |
| ***Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015*** | | | | | | |
| 3.1 | Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi | | | | | |
| | - Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | 100,27 (1993) | 99,73 (2009) | 100,00 | ● | Susenas, BPS |
| | - Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP | 99,86 (1993) | 101,99 (2009) | 100,00 | ● | |
| | - Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA | 93,67 (1993) | 96,16 (2009) | 100,00 | ▶ | |
| | - Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi | 74,06 (1993) | 102,95 (2009) | 100,00 | ▶ | |
| 3.1a | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | 98,44 (1993) | 99,85 (2009) | 100,00 | ● | |
| 3.2 | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian | 29,24% (1990) | 33,45% (2009) | Meningkat | ▶ | Sakernas, BPS |
| 3.3 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 12,50% (1990) | 17,90% (2009) | Meningkat | ▶ | KPU |
| **Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak** | | | | | | |
| ***Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015*** | | | | | | |
| 4.1 | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | 97 (1991) | 44 (2007) | 32 | ▶ | SDKI 1991, 2007 |
| 4.2 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 68 (1991) | 34 (2007) | 23 | ▶ | |
| 4.2a | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | 32 (1991) | 19 (2007) | Menurun | ▶ | |
| 4.3 | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | 44,50% (1991) | 67,00% (2007) | Meningkat | ▶ | |

| Indikator | | Acuan Dasar | Saat Ini | Target MDGs 2015 | Status | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu** | | | | | | |
| ***Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015*** | | | | | | |
| 5.1 | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | 390 (1991) | 228 (2007) | 102 | ▼ | SDKI 1993, 2007 |
| 5.2 | Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih | 40,70% (1992) | 77,34% (2009) | Meningkat | ▶ | Susenas 1992-2009 |
| ***Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015*** | | | | | | |
| 5.3 | Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara | 49,70% (1991) | 61,40% (2007) | Meningkat | ▶ | SDKI 1991, 2007 |
| 5.3a | Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern | 47,10% (1991) | 57,40% (2007) | Meningkat | ▼ | |
| 5.4 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun | 67 (1991) | 35 (2007) | Menurun | ▶ | |
| 5.5 | Cakupan pelayanan *Antenatal* (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) | | | | | |
| | - 1 kunjungan: | 75,00% | 93,30% | Meningkat | ▶ | |
| | - 4 kunjungan: | 56,00% (1991) | 81,50% (2007) | | ▶ | |
| 5.6 | *Unmet Need (*kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) | 12,70% (1991) | 9,10% (2007) | Menurun | ▼ | |
| **Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya** | | | | | | |
| ***Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015*** | | | | | | |
| 6.1 | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | - | 0,2% (2009) | Menurun | ▼ | Estimasi KemKes 2006 |
| 6.2 | Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir | 12,80% (2002/3) | Perempuan: 10,30% | Meningkat | ▼ | SKRRI 2002/2003 & 2007 |
| | | | Laki-laki: 18,40% (2007) | | ▼ | |
| 6.3 | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | | | | | |
| | - Menikah | - | **Perempuan:** 9,50% **Laki-laki:** 14,70% (2007) | Meningkat | ▼ | SDKI 2007 |

| Indikator | | Acuan Dasar | Saat Ini | Target MDGs 2015 | Status | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Belum Menikah | - | **Perempuan**: 2,60% **Laki-laki:** 1,40% (2007) | Meningkat | ▼ | SKRRI 2007 |
| ***Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010*** | | | | | | |
| 6.5 | Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral | - | 38,40% (2009) | Meningkat | ▼ | KemKes, 2010, per 30 November 2009 |
| ***Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015*** | | | | | | |
| 6.6 | Angka kejadian dan tingkat kematian Malaria | | | | | |
| 6.6a | Angka kejadian Malaria (per 1,000 penduduk): | 4,68 (1990) | 1,85 (2009) | Menurun | ▶ | KemKes 2007 |
| | Angka kejadian Malaria di Jawa & Bali (API) | 0,17 (1990) | 0,16 (2008) | Menurun | ▶ | API, KemKes 2008 |
| | Angka kejadian Malaria di luar Jawa & Bali (AMI) | 24,10 (1990) | 17,77 (2008) | Menurun | ▶ | AMI, KemKes 2008 |
| 6.6b | Tingkat kematian akibat Malaria | - | 1,3% (2007) | Menurun | ▶ | Riskesdas 2007 |
| 6.7 | Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida | - | 3,3% Rural: 4,5% Urban: 1,6% (2007) | Meningkat | ▼ | SDKI 2007 |
| 6.8 | Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis | | | | | |
| 6.8a | Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100,000 penduduk/tahun) | 343 (1990) | 228 (2009) | Dihentikan, mulai berkurang | ● | Laporan TB Global WHO, 2009 |
| 6.8b | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk) | 443 (1990) | 244 (2009) | | ● | |
| 6.8c | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000 penduduk) | 92 (1990) | 39 (2009) | | ● | |
| 6.9 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS | | | | ● | * Laporan TB Global WHO, 2009 |
| 6.9a | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | 20,00% (2000)* | 73,10% (2009)** | 70.00% | ● | ** Laporan Kemkes 2009 |
| 6.9b | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | 87,00% (2000)* | 91,00% (2009)** | 85.00% | ● | |

| Indikator | | Acuan Dasar | Saat Ini | Target MDGs 2015 | Status | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup** | | | | | | |
| ***Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dalam kebijakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan*** | | | | | | |
| 7.1 | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | 59,97% (1990) | 52,43% (2008) | Meningkat | ▼ | Kemenhut |
| 7.2 | Jumlah emisi karbon dioksida (CO2) | 1.416.074 Gg CO2e (2000) | 1.711.626 Gg CO2e (2008) | Berkurang 26% pada 2020 | ▼ | Kementerian Lingkungan Hidup |
| 7.3 | Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton | 8.332,7 metrik ton (1992) | 0 CFCs (2009) | 0 CFCs dengan mengurangi HCFCs | ▶ | Kementerian Lingkungan Hidup |
| 7.4 | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | 66,08% (1998) | 91,83% (2008) | tidak melebihi batas | ▶ | Kementerian Kelautan & Perikanan |
| 7.5 | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | 26,40% (1990) | 26,40% (2008) | Meningkat | ▶ | Kementerian Kehutanan |
| 7.6 | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial | 0,14 persen (1990)* | 4,35 persen (2009)** | Meningkat | ▶ | * Kementerian Kahutanan, ** Kementerian Kelautan & Perikanan |
| ***Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015*** | | | | | | |
| 7.8 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 37,73% (1993) | 47,71% (2009) | 68,87% | ▼ | Susenas, BPS |
| 7.8a | Perkotaan | 50,58% (1993) | 49,82% (2009) | 75,29% | ▼ | |
| 7.8b | Perdesaan | 31,61% (1993) | 45,72% (2009) | 65,81% | ▼ | |
| 7.9 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan | 24,81% (1993) | 51,19% (2009) | 62,41% | ▼ | |
| 7.9a | Perkotaan | 53,64% (1993) | 69,51% (2009) | 76,82% | ▼ | |
| 7.9b | Perdesaan | 11,10% (1993) | 33,96% (2009) | 55,55% | ▼ | |

| Indikator | | Acuan Dasar | Saat Ini | Target MDGs 2015 | Status | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020*** | | | | | | |
| 7.10 | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | 20,75% (1993) | 12,12% (2009) | - | | Susenas, BPS |
| **Tujuan 8: Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan** | | | | | | |
| ***Target 8A: Mengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif*** | | | | | | |
| 8.6a | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) | 41,60% (1990) | 39,50% (2009) | Meningkat | ▶ | BPS & Bank Dunia |
| 8.6b | Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum | 45,80% (2000) | 72,80% (2009) | Meningkat | ▶ | Laporan Perekonomian BI 2008, 2009 |
| 8.6c | Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR | 101,30% (2003) | 109,00% (2009) | Meningkat | ▶ | |
| ***Target 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang*** | | | | | | |
| 8.12 | Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB | 24,59% (1996) | 10,89% (2009) | Berkurang | ▶ | Kementerian Keuangan |
| 8.12a | Rasio pembayaran pokok utang dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor (DSR) | 51,00% (1996) | 22,00% (2009) | Berkurang | ▶ | Laporan Tahunan BI 2009 |
| ***Target 8F: Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi*** | | | | | | |
| 8.14 | Proporsi penduduk yang memiliki jaringan PSTN (kepadatan fasilitas telepon per jumlah penduduk) | 4,02% (2004) | 3,65% (2009) | Meningkat | | Kemkominfo, 2010 |
| 8.15 | Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler | 14,79% (2004) | 82,41% (2009) | 100,00% | ▶ | |
| 8.16 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | - | 11,51% (2009) | 50,00% | ▼ | Susenas 2009 |
| 8.16a | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | - | 8,32% (2009) | Meningkat | ▼ | Susenas 2009 |
| **Status:** ● Sudah tercapai ▶ Akan tercapai ▼ Perlu perhatian khusus | | | | | | |

**Lampiran 3 :** Profil Pencapaian Target MDGs Provinsi

| Indikator MDGs | Penduduk di bawah garis kemiskinan nasional (%) | Indeks kedalaman kemiskinan / P1 (%) | Konsumi penduduk termiskin (%) | Rasio pekerja terhadap penduduk > 15 tahun (%) | Tingkat pengangguran usia muda (15-24 tahun) (%) | Pekerja bebas & keluarga / total penduduk yang bekerja | Persentase balita kekurangan gizi | Persentase balita gizi buruk | Persentase balita gizi kurang | Kecukupan konsumsi kalori (Kkal) < 1400 | Kecukupan konsumsi kalori (Kkal) < 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Provinsi** | Susenas 2010 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Sakernas 2009 | Sakernas 2009 | Sakernas 2009 | Riskesdas 2007 | Riskesdas 2007 | Riskesdas 2007 | Susenas 2009 | Susenas 2009 |
| Aceh | 20,98 | 4,46 | 9,66 | 57,05 | 26,10 | 24,75 | 26,5 | 10,7 | 15,8 | 12,44 | 52,43 |
| Sumatera Utara | 11,31 | 1,92 | 9,17 | 63,30 | 20,34 | 29,40 | 22,7 | 8,4 | 14,3 | 14,48 | 63,03 |
| Sumatera Barat | 9,50 | 1,41 | 9,70 | 59,08 | 21,84 | 30,43 | 20,2 | 5,9 | 14,3 | 9,91 | 49,36 |
| Riau | 8,65 | 1,25 | 8,77 | 56,77 | 22,00 | 21,91 | 21,4 | 7,5 | 13,9 | 14,15 | 63,13 |
| Jambi | 8,34 | 1,38 | 10,10 | 62,96 | 18,02 | 26,24 | 18,9 | 6,3 | 12,6 | 15,34 | 62,79 |
| Sumatera Selatan | 15,47 | 3,06 | 9,26 | 63,11 | 19,91 | 31,53 | 18,2 | 6,5 | 11,7 | 14,75 | 56,77 |
| Bengkulu | 18,30 | 2,98 | 9,57 | 66,61 | 15,96 | 35,02 | 16,7 | 4,8 | 11,9 | 9,74 | 58,03 |
| Lampung | 18,94 | 3,94 | 8,72 | 63,29 | 17,48 | 36,43 | 17,5 | 5,7 | 11,8 | 14,86 | 59,56 |
| Bangka Belitung | 6,51 | 1,20 | 9,89 | 61,06 | 15,86 | 20,22 | 18,3 | 4,6 | 13,7 | 16,50 | 71,49 |
| Kepulauan Riau | 8,05 | 2,02 | 9,40 | 59,34 | 14,75 | 9,14 | 12,4 | 3,0 | 9,4 | 9,75 | 50,75 |
| DKI Jakarta | 3,48 | 0,57 | 8,08 | 58,51 | 24,97 | 6,80 | 12,9 | 2,9 | 10,0 | 14,63 | 64,44 |
| Jawa Barat | 11,27 | 1,95 | 8,19 | 56,00 | 32,21 | 24,94 | 15,0 | 3,7 | 11,3 | 12,68 | 59,54 |
| Jawa Tengah | 16,56 | 2,96 | 9,29 | 64,19 | 23,49 | 32,16 | 16,0 | 4,0 | 12,0 | 15,22 | 66,89 |
| DI Yogyakarta | 16,83 | 3,52 | 7,69 | 66,01 | 25,07 | 26,46 | 10,9 | 2,4 | 8,5 | 20,68 | 71,73 |
| Jawa Timur | 15,26 | 2,88 | 8,93 | 65,73 | 17,95 | 32,31 | 17,4 | 4,8 | 12,6 | 15,35 | 67,77 |
| Banten | 7,16 | 1,32 | 8,26 | 54,19 | 34,14 | 16,65 | 16,6 | 4,4 | 12,2 | 9,71 | 57,31 |
| Bali | 4,88 | 0,74 | 9,27 | 75,39 | 9,96 | 27,98 | 11,4 | 3,2 | 8,2 | 3,88 | 40,46 |
| Nusa Tenggara Barat | 21,55 | 5,15 | 8,27 | 64,36 | 13,21 | 38,02 | 24,8 | 8,1 | 16,7 | 13,29 | 58,95 |
| Nusa Tenggara Timur | 23,03 | 4,14 | 9,13 | 69,22 | 9,13 | 37,49 | 33,6 | 9,4 | 24,2 | 21,35 | 58,61 |
| Kalimantan Barat | 9,02 | 1,55 | 8,74 | 69,45 | 15,49 | 31,84 | 22,5 | 8,5 | 14,0 | 16,69 | 61,09 |
| Kalimantan Tengah | 6,77 | 1,03 | 9,71 | 67,92 | 13,34 | 28,21 | 24,2 | 8,1 | 16,1 | 11,10 | 50,76 |
| Kalimantan Selatan | 5,21 | 0,73 | 8,68 | 67,06 | 20,23 | 27,54 | 26,6 | 8,4 | 18,2 | 11,28 | 53,66 |
| Kalimantan Timur | 7,66 | 1,51 | 8,37 | 57,44 | 26,33 | 17,17 | 19,3 | 6,2 | 13,1 | 30,09 | 74,62 |
| Sulawesi Utara | 9,10 | 1,55 | 9,51 | 55,50 | 32,82 | 20,89 | 15,8 | 4,3 | 11,5 | 14,57 | 63,61 |
| Sulawesi Tengah | 18,07 | 4,09 | 8,42 | 65,51 | 13,53 | 31,19 | 27,6 | 8,9 | 18,7 | 18,05 | 60,30 |
| Sulawesi Selatan | 11,60 | 2,08 | 8,31 | 56,92 | 17,14 | 29,23 | 17,6 | 5,1 | 12,5 | 12,71 | 55,28 |
| Sulawesi Tenggara | 17,05 | 3,44 | 8,97 | 67,05 | 10,80 | 32,56 | 22,7 | 6,8 | 15,9 | 16,55 | 60,34 |
| Gorontalo | 23,19 | 4,59 | 9,07 | 60,01 | 16,66 | 27,96 | 25,4 | 8,2 | 17,2 | 18,75 | 71,02 |
| Sulawesi Barat | 13,58 | 2,47 | 9,58 | 65,00 | 12,11 | 29,30 | 25,4 | 10,0 | 15,4 | 11,90 | 69,21 |
| Maluku | 27,74 | 5,59 | 9,84 | 58,52 | 20,73 | 30,94 | 27,8 | 9,3 | 18,5 | 18,22 | 60,04 |
| Maluku Utara | 9,42 | 1,44 | 9,66 | 59,85 | 18,74 | 27,63 | 22,8 | 6,7 | 16,1 | 32,01 | 72,04 |
| Papua Barat | 34,88 | 9,75 | 9,47 | 63,34 | 19,36 | 26,20 | 23,2 | 6,8 | 16,4 | 37,16 | 68,99 |
| Papua | 36,80 | 9,07 | 8,63 | 74,58 | 10,02 | 37,75 | 21,2 | 6,6 | 14,6 | 22,64 | 60,87 |
| **INDONESIA** | **13,33** | **2,50** | **8,75** | **61,93** | **22,20** | **28,36** | **18,4** | **5,4** | **13,0** | **14,47** | **61,86** |

| Indikator MDGs | Angka melek huruf usia 15-24 tahun | Angka melek huruf penduduk laki-laki usia 15-24 tahun | Angka melek huruf penduduk perempuan usia 15-24 tahun | Rasio APM perempuan /laki-laki di SD, MI & Paket A | Rasio APM perempuan /laki-laki di SMP, MTs & Paket B | Rasio APM perempuan /laki-laki di SMA | Rasio APM perempuan /laki-laki di perguruan tinggi | Rasio melek huruf perempuan / laki-laki usia 15-24 tahun | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan (non-pertanian) – (%) | Angka kematian balita / AKBA (5q0) | Angka kematian bayi / AKB (1q0) | Angka kematian neonatal (NN) | Anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak - total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Provinsi** | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Sakernas 2009 | SDKI 2007 | SDKI 2007 | SDKI 2007 | SDKI 2007 |
| Aceh | 99,90 | 99,89 | 99,92 | 100,01 | 99,63 | 103,19 | 138,95 | 100,03 | 34,20 | 45 | 25 | 14 | 40.9 |
| Sumatera Utara | 99,86 | 99,93 | 99,79 | 100,23 | 101,90 | 100,82 | 106,78 | 99,86 | 33,30 | 67 | 46 | 24 | 36.6 |
| Sumatera Barat | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 100,38 | 107,03 | 116,92 | 134,68 | 100,00 | 36,73 | 62 | 47 | 34 | 67.4 |
| Riau | 99,95 | 99,94 | 99,95 | 101,01 | 96,41 | 111,02 | 117,16 | 100,02 | 27,86 | 47 | 37 | 28 | 61.9 |
| Jambi | 99,98 | 99,96 | 100,00 | 100,64 | 105,58 | 109,99 | 97,21 | 100,04 | 33,68 | 47 | 39 | 23 | 58.0 |
| Sumatera Selatan | 99,92 | 99,91 | 99,94 | 99,77 | 108,84 | 111,64 | 118,86 | 100,03 | 37,89 | 52 | 42 | 25 | 58.8 |
| Bengkulu | 99,87 | 99,92 | 99,82 | 100,43 | 105,92 | 104,86 | 125,76 | 99,90 | 30,26 | 65 | 46 | 17 | 79.2 |
| Lampung | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 98,45 | 96,82 | 94,49 | 162,80 | 100,00 | 27,20 | 55 | 43 | 27 | 59.2 |
| Bangka Belitung | 99,68 | 99,73 | 99,64 | 100,54 | 108,81 | 112,19 | 106,07 | 99,91 | 24,84 | 46 | 39 | 20 | 64.6 |
| Kepulauan Riau | 99,91 | 99,93 | 99,89 | 102,50 | 99,00 | 143,22 | 88,70 | 99,96 | 38,50 | 58 | 43 | 18 | 76.8 |
| DKI Jakarta | 99,99 | 99,98 | 100,00 | 99,49 | 95,67 | 78,85 | 81,09 | 100,02 | 40,23 | 36 | 28 | 15 | 69.8 |
| Jawa Barat | 99,90 | 99,92 | 99,87 | 99,64 | 101,99 | 86,72 | 84,33 | 99,95 | 30,64 | 49 | 39 | 19 | 74.2 |
| Jawa Tengah | 99,82 | 99,85 | 99,79 | 99,32 | 105,54 | 98,07 | 124,88 | 99,94 | 35,73 | 32 | 26 | 14 | 72.3 |
| DI Yogyakarta | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,19 | 114,32 | 94,69 | 76,35 | 100,00 | 34,62 | 22 | 19 | 15 | 94.8 |
| Jawa Timur | 99,44 | 99,51 | 99,36 | 99,61 | 99,83 | 87,98 | 93,29 | 99,86 | 33,75 | 45 | 35 | 21 | 74.0 |
| Banten | 99,94 | 99,96 | 99,92 | 100,07 | 98,67 | 92,00 | 95,17 | 99,96 | 32,40 | 58 | 46 | 25 | 74.6 |
| Bali | 99,14 | 99,09 | 99,19 | 97,79 | 94,58 | 91,86 | 88,94 | 100,10 | 36,08 | 38 | 34 | 14 | 85.5 |
| Nusa Tenggara Barat | 99,01 | 99,57 | 98,54 | 99,63 | 102,96 | 83,64 | 113,44 | 98,96 | 33,21 | 92 | 72 | 34 | 77.1 |
| Nusa Tenggara Timur | 97,79 | 97,95 | 97,64 | 100,71 | 111,78 | 118,21 | 101,29 | 99,68 | 29,05 | 80 | 57 | 31 | 60.5 |
| Kalimantan Barat | 99,15 | 99,10 | 99,19 | 99,36 | 101,44 | 101,05 | 90,79 | 100,09 | 30,37 | 59 | 46 | 23 | 64.9 |
| Kalimantan Tengah | 99,86 | 99,91 | 99,82 | 98,72 | 104,84 | 98,72 | 105,91 | 99,92 | 28,11 | 34 | 30 | 13 | 77.6 |
| Kalimantan Selatan | 99,85 | 99,91 | 99,79 | 99,39 | 103,99 | 100,98 | 157,79 | 99,88 | 31,18 | 75 | 58 | 39 | 57.8 |
| Kalimantan Timur | 99,86 | 99,92 | 99,80 | 99,84 | 104,23 | 109,41 | 118,32 | 99,88 | 28,74 | 38 | 26 | 16 | 78.3 |
| Sulawesi Utara | 99,86 | 99,74 | 99,99 | 100,01 | 104,75 | 109,80 | 126,15 | 100,25 | 30,47 | 43 | 35 | 24 | 80.9 |
| Sulawesi Tengah | 99,90 | 99,80 | 100,00 | 99,36 | 108,29 | 104,64 | 109,53 | 100,20 | 35,55 | 69 | 60 | 28 | 51.5 |
| Sulawesi Selatan | 98,31 | 98,20 | 98,41 | 99,76 | 99,10 | 97,45 | 142,62 | 100,21 | 34,03 | 53 | 41 | 22 | 66.6 |
| Sulawesi Tenggara | 99,39 | 99,33 | 99,46 | 99,39 | 103,79 | 101,44 | 125,20 | 100,13 | 33,07 | 62 | 41 | 16 | 71.8 |
| Gorontalo | 99,03 | 98,71 | 99,34 | 100,18 | 116,17 | 108,45 | 107,85 | 100,64 | 37,27 | 69 | 52 | 22 | 65.9 |
| Sulawesi Barat | 97,65 | 97,24 | 98,05 | 100,35 | 105,18 | 124,06 | 136,41 | 100,84 | 33,74 | 96 | 74 | 46 | 58.0 |
| Maluku | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 101,81 | 104,17 | 107,34 | 109,40 | 100,00 | 33,20 | 93 | 59 | 25 | 50.2 |
| Maluku Utara | 99,78 | 99,76 | 99,81 | 98,65 | 93,60 | 94,65 | 117,90 | 100,05 | 32,33 | 74 | 51 | 32 | 50.8 |
| Papua Barat | 97,01 | 97,95 | 96,06 | 96,39 | 97,69 | 68,60 | 103,34 | 98,07 | 27,05 | 62 | 36 | 21 | 51.0 |
| Papua | 79,69 | 84,28 | 74,93 | 98,33 | 89,54 | 88,83 | 87,68 | 88,90 | 26,81 | 64 | 41 | 24 | 49.0 |
| **INDONESIA** | **99,47** | **99,55** | **99,40** | **99,73** | **101,99** | **96,16** | **102,95** | **99,85** | **33,45** | **44** | **34** | **19** | **67.0** |

| Indikator MDGs | Proporsi kelahiran yang ditolong oleh nakes | Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) | Angka Kesuburan Menurut Kelompok Umur 15-19 (ASFR) | Penggunaan kontrasepsi perempuan menikah (15-49) - semua metode | Penggunaan kontrasepsi perempuan menikah (15-49 tahun) - metode modern | Penggunaan kontrasepsi perempuan menikah (15-49 tahun) - metode tradisional | Cakupan *antenatal care* (K1) | Cakupan *antenatal care* (K4) | *Unmet need* KB | *Unmet need* KB – penjarangan | *Unmet need* KB – pembatasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Provinsi** | Susenas 2009 | SDKI 2007 (adjusted) | SDKI 2007 | SDKI 2007 | SDKI 2007 | SDKI 2007 | SDKI 2007 | SDKI 2007 | SDKI 2007 | SDKI 2007 | SDKI 2007 |
| Aceh | 85,86 | 2,8 | 33,0 | 47,4 | 45,4 | 2,0 | 89.2 | 70.0 | 12,0 | 8,9 | 3,0 |
| Sumatera Utara | 88,68 | 3,5 | 19,0 | 54,2 | 42,6 | 11,5 | 89.3 | 66.3 | 12,3 | 5,1 | 7,2 |
| Sumatera Barat | 88,86 | 3,0 | 14,0 | 59,9 | 52,8 | 7,2 | 96.0 | 86.1 | 11,2 | 6,3 | 5,0 |
| Riau | 82,71 | 2,6 | 25,0 | 56,7 | 52,8 | 4,0 | 93.2 | 77.9 | 9,1 | 5,5 | 3,6 |
| Jambi | 70,51 | 2,4 | 30,0 | 65,2 | 62,5 | 2,7 | 84.6 | 75.7 | 7,0 | 3,5 | 3,6 |
| Sumatera Selatan | 78,72 | 2,3 | 25,0 | 64,8 | 62,6 | 2,1 | 91.3 | 74.0 | 7,4 | 3,4 | 4,0 |
| Bengkulu | 85,20 | 2,3 | 44,0 | 74,0 | 70,4 | 3,6 | 93.7 | 79.4 | 6,1 | 2,7 | 3,4 |
| Lampung | 76,37 | 2,4 | 39,0 | 71,1 | 66,0 | 5,0 | 95.4 | 86.2 | 5,5 | 2,4 | 3,1 |
| Bangka Belitung | 85,37 | 2,4 | 57,0 | 67,8 | 64,7 | 3,1 | 94.0 | 86.2 | 3,2 | 1,9 | 1,3 |
| Kepulauan Riau | 87,45 | 2,6 | 25,0 | 57,6 | 54,0 | 3,5 | 93.8 | 85.1 | 12,3 | 5,3 | 7,1 |
| DKI Jakarta | 98,14 | 1,8 | 11,0 | 60,1 | 56,4 | 3,7 | 99.5 | 97.7 | 6,9 | 3,2 | 3,7 |
| Jawa Barat | 70,17 | 2,3 | 36,0 | 61,1 | 60,3 | 0,8 | 95.3 | 84.4 | 10,0 | 4,6 | 5,4 |
| Jawa Tengah | 84,30 | 2,0 | 27,0 | 63,7 | 60,0 | 3,8 | 97.3 | 90.4 | 7,4 | 2,7 | 4,7 |
| DI Yogyakarta | 96,94 | 1,5 | 7,0 | 66,9 | 54,8 | 12,0 | 99.3 | 97.0 | 6,8 | 2,9 | 3,9 |
| Jawa Timur | 86,33 | 1,9 | 54,0 | 66,1 | 62,3 | 3,8 | 93.2 | 86.4 | 8,2 | 3,2 | 5,1 |
| Banten | 68,86 | 2,5 | 23,0 | 57,4 | 55,4 | 2,0 | 86.3 | 72.6 | 9,0 | 5,6 | 3,4 |
| Bali | 96,22 | 2,1 | 43,0 | 69,4 | 65,4 | 4,0 | 98.8 | 94.4 | 5,8 | 2,2 | 3,6 |
| Nusa Tenggara Barat | 71,32 | 2,7 | 60,0 | 54,8 | 52,2 | 2,7 | 95.3 | 86.0 | 12,9 | 8,6 | 4,3 |
| Nusa Tenggara Timur | 49,85 | 3,7 | 31,0 | 42,1 | 30,1 | 12,0 | 87.1 | 74.4 | 17,4 | 9,8 | 7,7 |
| Kalimantan Barat | 59,06 | 2,3 | 41,0 | 62,7 | 61,2 | 1,5 | 90.6 | 72.9 | 7,7 | 4,7 | 3,0 |
| Kalimantan Tengah | 63,55 | 2,5 | 34,0 | 66,5 | 65,2 | 1,3 | 91.0 | 82.9 | 5,7 | 3,7 | 2,1 |
| Kalimantan Selatan | 76,01 | 2,5 | 54,0 | 64,4 | 63,2 | 1,2 | 93.0 | 76.1 | 6,2 | 3,3 | 2,9 |
| Kalimantan Timur | 85,24 | 2,0 | 34,0 | 59,2 | 55,4 | 3,9 | 93.9 | 81.6 | 7,7 | 3,4 | 4,3 |
| Sulawesi Utara | 82,81 | 2,3 | 34,0 | 69,3 | 66,7 | 2,6 | 95.9 | 79.1 | 6,1 | 2,2 | 3,9 |
| Sulawesi Tengah | 62,47 | 3,3 | 92,0 | 63,6 | 59,8 | 3,8 | 90.7 | 75.0 | 8,3 | 4,0 | 4,3 |
| Sulawesi Selatan | 69,48 | 2,3 | 34,0 | 53,4 | 42,9 | 10,5 | 92.2 | 64.4 | 13,9 | 9,2 | 4,6 |
| Sulawesi Tenggara | 48,72 | 3,0 | 48,0 | 50,7 | 44,4 | 6,2 | 91.3 | 71.3 | 12,9 | 8,5 | 4,4 |
| Gorontalo | 63,17 | 2,3 | 61,0 | 60,1 | 58,8 | 1,4 | 88.5 | 66.3 | 6,6 | 4,9 | 1,8 |
| Sulawesi Barat | 47,45 | 3,1 | 47,0 | 45,4 | 44,5 | 0,9 | 86.6 | 61.3 | 17,4 | 12,3 | 5,0 |
| Maluku | 42,48 | 3,7 | 31,0 | 34,1 | 29,4 | 4,8 | 70.3 | 50.7 | 22,4 | 8,9 | 13,5 |
| Maluku Utara | 47,21 | 2,9 | 82,0 | 48,8 | 46,2 | 2,5 | 88.0 | 80.0 | 13,0 | 6,7 | 6,3 |
| Papua Barat | 60,43 | 2,9 | 51,0 | 39,6 | 37,5 | 13,8 | 80.4 | 50.0 | 16,6 | 12,2 | 4,3 |
| Papua | 49,08 | 3,2 | 40,0 | 38,3 | 24,5 | 2,1 | 69.0 | 52.7 | 15,8 | 7,7 | 8,1 |
| **INDONESIA** | **77,34** | **2,3** | **35,0** | **61,4** | **57,4** | **4,0** | **93.3** | **81.5** | **9,1** | **4,3** | **4,7** |

| Indikator MDGs | Angka kumulatif kasus HIV/ AIDS per 100,000 penduduk | Angka kumulatif kasus HIV/ AIDS | Prevalensi kasus AIDS per 100,000 penduduk | Angka kejadian malaria menurut diagnosa klinis | Angka kejadian malaria menurut konfirmasi laboratorium | Balita diare dalam 2 minggu terakhir | Angka Penemuan Kasus Baru TB Paru BTA positif (CDR) | Angka kesembuhan - *Cured Rate* | Angka keberhasilan pengobatan - *Success Rate* | Angka kasus DBD | Tingkat kejadian DBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Provinsi** | KemKes 2010 | KemKes 2010 | KemKes 2010 | KemKes 2008 | KemKes 2008 | SDKI 2007 | KemKes 2009 | KemKes 2009 | KemKes 2009 | KemKes 2008 | KemKes 2008 |
| Aceh | 0,11 | 44 | 1,07 | 8.637 | 1.053 | 19,1 | 43,9 | 84,7 | 93,1 | 2.436 | 54,76 |
| Sumatera Utara | 0,37 | 485 | 3,71 | 73.275 | 2.274 | 15,8 | 65,6 | 93,5 | 96,1 | 4.454 | 34,49 |
| Sumatera Barat | 0,73 | 382 | 8,50 | 6.325 | 1.015 | 14,5 | 48,3 | 77,9 | 88,1 | 1.907 | 42,67 |
| Riau | 0,84 | 476 | 8,51 | 12.644 | 957 | 16,7 | 33,9 | 72,6 | 83,9 | 828 | 15,96 |
| Jambi | 0,58 | 165 | 5,77 | 51.401 | 6.028 | 15,3 | 60,5 | 83,5 | 92,3 | 245 | 8,64 |
| Sumatera Selatan | 0,30 | 219 | 3,04 | 29.212 | 2.389 | 14,7 | 44,8 | 87,1 | 94,0 | 2.360 | 34,75 |
| Bengkulu | 0,52 | 91 | 5,20 | 31.064 | 6.355 | 20,5 | 59,5 | 92,6 | 97,4 | 339 | 19,39 |
| Lampung | 0,19 | 144 | 1,86 | 17.566 | 2.108 | 10,6 | 41,2 | 85,9 | 92,8 | 4.807 | 68,83 |
| Bangka Belitung | 1,14 | 117 | 11,36 | 42.288 | 8.426 | 6,4 | 52,2 | 84,9 | 87,2 | 34 | 3,07 |
| Kepulauan Riau | 2,22 | 334 | 22,29 | 16.572 | 1.666 | 14,3 | 32,3 | 67,4 | 88,5 | 1.724 | 133,07 |
| DKI Jakarta | 3,17 | 2.828 | 31,67 | - | - | 6,9 | 81,0 | 69,5 | 85,6 | 28.361 | 317,09 |
| Jawa Barat | 0,86 | 3.599 | 8,60 | 42.924 | 636 | 18,2 | 70,8 | 85,1 | 92,0 | 23.248 | 54,23 |
| Jawa Tengah | 0,22 | 752 | 2,33 | 120.042 | 947 | 9,3 | 48,1 | 83,8 | 90,1 | 19.235 | 58,45 |
| DI Yogyakarta | 0,85 | 290 | 8,51 | 3.040 | 67 | 5,4 | 51,5 | 78,4 | 82,5 | 2.119 | 61,72 |
| Jawa Timur | 0,89 | 3.540 | 9,80 | 38.920 | 2.651 | 13,3 | 56,6 | 82,8 | 89,2 | 16.589 | 44,68 |
| Banten | 0,31 | 318 | 3,06 | 2.692 | 103 | 10,1 | 77,7 | 85,5 | 92,2 | 3.954 | 46,16 |
| Bali | 4,55 | 1.725 | 48,55 | 18.522 | 242 | 9,1 | 66,7 | 66,9 | 85,4 | 6.254 | 181,31 |
| Nusa Tenggara Barat | 0,26 | 133 | 2,87 | 96.621 | 21.564 | 18,5 | 33,2 | 78,7 | 91,8 | 777 | 18,10 |
| Nusa Tenggara Timur | 0,32 | 139 | 3,19 | 425.134 | 83.110 | 15,2 | 34,7 | 80,6 | 90,7 | 279 | 7,07 |
| Kalimantan Barat | 1,69 | 794 | 16,91 | 10.859 | 2.168 | 15,2 | 45,8 | 88,8 | 93,0 | 947 | 22,29 |
| Kalimantan Tengah | 0,09 | 30 | 1,26 | 19.784 | 4.470 | 20,8 | 30,6 | 80,1 | 92,8 | 531 | 27,11 |
| Kalimantan Selatan | 0,08 | 27 | 0,78 | 10.581 | 2.630 | 15,7 | 39,4 | 89,8 | 93,9 | 576 | 15,69 |
| Kalimantan Timur | 0,04 | 11 | 0,35 | 14.654 | 3.487 | 13,7 | 31,1 | 67,7 | 85,6 | 5.762 | 220,03 |
| Sulawesi Utara | 0,77 | 173 | 7,69 | 27.063 | 5.530 | 14,1 | 85,2 | 87,1 | 96,8 | 1.430 | 63,58 |
| Sulawesi Tengah | 0,05 | 12 | 0,46 | 45.164 | 6.486 | 15,8 | 36,8 | 80,7 | 94,3 | 1.389 | 55,25 |
| Sulawesi Selatan | 0,67 | 591 | 6,65 | 9.386 | 1.933 | 11,7 | 38,7 | 86,4 | 89,9 | 3.545 | 46,46 |
| Sulawesi Tenggara | 0,09 | 21 | 0,91 | 22.612 | 609 | 14,2 | 51,6 | 80,6 | 95,5 | 1.006 | 46,21 |
| Gorontalo | 0,03 | 3 | 0,33 | 10.674 | 3.160 | 16,7 | 66,3 | 80,4 | 97,1 | 172 | 18,74 |
| Sulawesi Barat | - | - | - | 8.213 | 391 | 22,2 | 42,8 | 74,5 | 86,9 | 37 | 3,65 |
| Maluku | 1,42 | 192 | 14,21 | 54.907 | 12.376 | 9,7 | 71,6 | 89,2 | 97,3 | - | - |
| Maluku Utara | 0,10 | 13 | 1,36 | 49.683 | 8.606 | 14,1 | 34,6 | 52,2 | 83,3 | 250 | 25,25 |
| Papua Barat | 0,89 | 58 | 8,93 | 117.466 | 32.337 | 13,0 | 40,8 | 38,5 | 70,5 | 510 | 13,47 |
| Papua | 13,31 | 2.858 | 135,44 | 187.005 | 40.503 | 15,3 | 56,8 | 49,5 | 77,0 | 228 | 90,41 |
| **INDONESIA** | **0,87** | 20.564 | **8,92** | **1.624.930** | **266.277** | **13,7** | **73,1** | **82,9** | **91,0** | **136.333** | **60,06** |

| Indikator MDGs | Akses terhadap sumber air minum layak (total) | Akses terhadap sumber air minum layak (perkotaan) | Akses terhadap sumber air minum layak (perdesaan) | Akses terhadap air minum perpipaan (perkotaan) | Akses terhadap air minum perpipaan (perdesaan) | Akses terhadap sumber air minum terlindung (perkotaan) | Akses terhadap sumber air minum terlindung (perdesaan) | Akses terhadap sumber air minum kemasan (total) | Akses terhadap sumber air minum kemasan (perkotaan) | Akses terhadap sumber air minum kemasan (perdesaan) | Akses terhadap sumber air minum tidak layak (total) | Access to unimproved water source (perkotaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Provinsi** | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 |
| Aceh | 30,60 | 34,19 | 29,20 | 21,52 | 5,41 | 12,41 | 23,83 | 18,80 | 40,85 | 10,22 | 50,60 | 24,96 |
| Sumatera Utara | 51,04 | 62,45 | 41,33 | 42,00 | 5,76 | 20,77 | 35,63 | 8,05 | 14,43 | 2,62 | 40,91 | 23,13 |
| Sumatera Barat | 46,62 | 58,14 | 40,53 | 36,07 | 12,17 | 22,19 | 28,25 | 8,68 | 18,63 | 3,42 | 44,69 | 23,22 |
| Riau | 40,96 | 35,83 | 46,08 | 3,43 | 0,89 | 31,98 | 45,48 | 23,71 | 39,68 | 7,78 | 35,33 | 24,49 |
| Jambi | 51,19 | 63,59 | 45,44 | 27,57 | 10,15 | 35,67 | 35,68 | 8,29 | 17,13 | 4,19 | 40,53 | 19,27 |
| Sumatera Selatan | 48,53 | 59,66 | 41,91 | 44,52 | 4,33 | 15,73 | 37,94 | 9,50 | 18,41 | 4,20 | 41,98 | 21,93 |
| Bengkulu | 33,02 | 43,15 | 27,60 | 22,66 | 8,05 | 20,30 | 19,46 | 5,03 | 10,42 | 2,15 | 61,95 | 46,43 |
| Lampung | 40,29 | 37,71 | 41,20 | 9,55 | 2,11 | 27,96 | 39,16 | 6,16 | 15,68 | 2,82 | 53,55 | 46,62 |
| Bangka Belitung | 36,84 | 34,31 | 39,18 | 3,54 | 0,15 | 31,01 | 38,95 | 23,78 | 35,50 | 12,95 | 39,38 | 30,19 |
| Kepulauan Riau | 37,74 | 36,22 | 39,46 | 21,34 | 1,81 | 15,44 | 36,80 | 26,33 | 48,44 | 1,33 | 35,93 | 15,34 |
| DKI Jakarta | 34,81 | 34,81 | - | 22,74 | - | 11,96 | - | 53,49 | 53,49 | - | 11,70 | 11,70 |
| Jawa Barat | 40,51 | 41,04 | 39,77 | 15,88 | 6,42 | 25,08 | 33,32 | 15,32 | 22,07 | 6,01 | 44,18 | 36,89 |
| Jawa Tengah | 58,30 | 61,54 | 55,28 | 26,22 | 6,74 | 35,11 | 48,37 | 4,21 | 6,51 | 2,06 | 37,48 | 31,95 |
| DI Yogyakarta | 60,38 | 57,61 | 65,85 | 6,69 | 15,31 | 50,97 | 50,55 | 12,68 | 18,57 | 1,03 | 26,94 | 23,82 |
| Jawa Timur | 55,70 | 54,06 | 57,25 | 21,45 | 8,24 | 32,42 | 48,90 | 11,86 | 20,36 | 3,82 | 32,44 | 25,58 |
| Banten | 27,47 | 27,54 | 27,35 | 8,74 | 4,33 | 18,64 | 22,70 | 27,06 | 38,15 | 9,57 | 45,48 | 34,32 |
| Bali | 59,99 | 51,63 | 71,42 | 29,21 | 32,61 | 22,32 | 38,92 | 23,34 | 37,07 | 4,55 | 16,68 | 11,30 |
| Nusa Tenggara Barat | 44,96 | 49,76 | 41,51 | 21,47 | 8,62 | 28,30 | 32,93 | 8,08 | 13,74 | 4,01 | 46,96 | 36,49 |
| Nusa Tenggara Timur | 45,45 | 76,97 | 39,00 | 60,14 | 8,92 | 16,78 | 29,98 | 1,82 | 7,83 | 0,59 | 52,73 | 15,20 |
| Kalimantan Barat | 54,02 | 76,28 | 45,71 | 10,40 | 4,51 | 65,97 | 40,99 | 5,39 | 15,34 | 1,67 | 40,59 | 8,38 |
| Kalimantan Tengah | 36,89 | 53,03 | 28,56 | 34,98 | 6,55 | 18,25 | 21,81 | 7,08 | 17,52 | 1,70 | 56,02 | 29,44 |
| Kalimantan Selatan | 51,97 | 76,64 | 34,79 | 65,85 | 14,55 | 10,74 | 20,30 | 4,44 | 8,24 | 1,79 | 43,60 | 15,12 |
| Kalimantan Timur | 55,71 | 65,10 | 40,54 | 56,27 | 13,44 | 8,58 | 26,82 | 20,15 | 25,32 | 11,80 | 24,14 | 9,58 |
| Sulawesi Utara | 44,49 | 43,79 | 45,03 | 24,31 | 13,45 | 19,27 | 31,61 | 19,51 | 35,47 | 7,27 | 35,99 | 20,74 |
| Sulawesi Tengah | 44,36 | 49,01 | 43,13 | 33,15 | 10,65 | 15,36 | 32,45 | 6,28 | 26,80 | 0,83 | 49,36 | 24,19 |
| Sulawesi Selatan | 50,13 | 63,38 | 43,74 | 51,01 | 7,76 | 12,38 | 35,97 | 8,69 | 21,46 | 2,54 | 41,18 | 15,15 |
| Sulawesi Tenggara | 59,12 | 71,13 | 55,50 | 47,16 | 13,81 | 24,14 | 41,92 | 2,68 | 8,73 | 0,85 | 38,21 | 20,14 |
| Gorontalo | 44,85 | 61,47 | 37,18 | 36,46 | 10,20 | 25,16 | 26,83 | 3,78 | 7,71 | 1,96 | 51,38 | 30,82 |
| Sulawesi Barat | 42,92 | 65,01 | 32,28 | 40,96 | 4,54 | 23,66 | 27,44 | 5,11 | 9,89 | 2,81 | 51,97 | 25,10 |
| Maluku | 55,50 | 74,72 | 48,59 | 48,56 | 8,00 | 26,35 | 40,46 | 1,92 | 6,52 | 0,27 | 42,59 | 18,76 |
| Maluku Utara | 43,75 | 66,56 | 34,16 | 51,72 | 8,56 | 15,11 | 25,77 | 3,31 | 9,03 | 0,91 | 52,94 | 24,41 |
| Papua Barat | 48,08 | 55,20 | 45,12 | 33,06 | 3,24 | 21,84 | 41,76 | 15,54 | 31,16 | 9,04 | 36,38 | 13,64 |
| Papua | 35,44 | 53,56 | 30,29 | 41,36 | 3,70 | 11,78 | 25,89 | 9,65 | 29,68 | 3,95 | 54,91 | 16,76 |
| **INDONESIA** | **47,71** | **49,82** | **45,72** | **23,70** | **7,38** | **26,09** | **38,27** | **13,05** | **22,73** | **3,94** | **39,24** | **27,45** |

| Indikator MDGs | Akses terhadap sumber air minum tidak layak (perdesaan) | Akses terhadap sanitasi layak | Akses terhadap sanitasi layak (perkotaan) | Akses terhadap sanitasi layak (perdesaan) | Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan | Rumah tangga yang memiliki komputer | Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Provinsi** | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 | Susenas 2009 |
| Aceh | 60,58 | 42,03 | 73,03 | 29,96 | 9,79 | 6,13 | 7,68 |
| Sumatera Utara | 56,05 | 51,92 | 72,88 | 34,09 | 7,88 | 7,16 | 8,28 |
| Sumatera Barat | 56,05 | 39,21 | 65,73 | 25,19 | 8,54 | 8,43 | 13,87 |
| Riau | 46,13 | 52,75 | 75,60 | 29,96 | 10,45 | 10,44 | 12,31 |
| Jambi | 50,37 | 40,93 | 63,53 | 30,48 | 7,65 | 6,35 | 7,08 |
| Sumatera Selatan | 53,89 | 41,48 | 73,10 | 22,71 | 13,96 | 7,47 | 9,18 |
| Bengkulu | 70,25 | 34,66 | 59,16 | 21,55 | 13,34 | 10,47 | 10,45 |
| Lampung | 55,98 | 38,43 | 57,60 | 31,71 | 10,92 | 4,28 | 5,47 |
| Bangka Belitung | 47,87 | 60,66 | 77,04 | 45,51 | 8,51 | 9,13 | 10,17 |
| Kepulauan Riau | 59,21 | 45,78 | 75,43 | 12,24 | 14,12 | 10,88 | 12,56 |
| DKI Jakarta | - | 80,37 | 80,37 | - | 25,14 | 20,34 | 34,32 |
| Jawa Barat | 54,21 | 52,17 | 62,12 | 38,47 | 14,58 | 9,27 | 12,29 |
| Jawa Tengah | 42,66 | 54,06 | 67,20 | 41,76 | 5,59 | 6,18 | 9,64 |
| DI Yogyakarta | 33,13 | 75,35 | 84,99 | 56,26 | 5,10 | 18,99 | 27,92 |
| Jawa Timur | 38,93 | 51,07 | 69,51 | 33,63 | 8,60 | 7,61 | 11,35 |
| Banten | 63,07 | 58,82 | 77,03 | 30,10 | 15,65 | 12,00 | 12,53 |
| Bali | 24,03 | 75,95 | 85,72 | 62,60 | 13,25 | 11,58 | 12,38 |
| Nusa Tenggara Barat | 54,48 | 39,83 | 49,51 | 32,86 | 23,96 | 4,01 | 6,82 |
| Nusa Tenggara Timur | 60,41 | 14,98 | 35,43 | 10,80 | 28,85 | 4,63 | 4,64 |
| Kalimantan Barat | 52,62 | 40,12 | 81,23 | 24,77 | 5,74 | 4,98 | 6,93 |
| Kalimantan Tengah | 69,74 | 28,78 | 56,13 | 10,11 | 13,26 | 6,31 | 6,05 |
| Kalimantan Selatan | 63,41 | 41,16 | 64,31 | 25,05 | 9,00 | 6,51 | 10,26 |
| Kalimantan Timur | 47,67 | 58,48 | 75,69 | 30,69 | 9,74 | 14,24 | 18,57 |
| Sulawesi Utara | 47,70 | 63,59 | 78,84 | 51,89 | 17,01 | 7,97 | 11,62 |
| Sulawesi Tengah | 56,04 | 42,02 | 70,41 | 34,49 | 14,05 | 4,69 | 5,82 |
| Sulawesi Selatan | 53,72 | 57,58 | 85,38 | 44,18 | 8,58 | 5,27 | 9,80 |
| Sulawesi Tenggara | 43,65 | 45,91 | 78,87 | 35,98 | 10,69 | 5,40 | 6,55 |
| Gorontalo | 60,86 | 43,84 | 73,17 | 30,31 | 12,46 | 7,94 | 9,91 |
| Sulawesi Barat | 64,91 | 45,35 | 66,59 | 35,13 | 19,08 | 4,80 | 4,13 |
| Maluku | 51,14 | 38,69 | 70,50 | 27,27 | 18,81 | 5,24 | 7,82 |
| Maluku Utara | 64,93 | 43,18 | 85,50 | 25,39 | 7,55 | 5,68 | 6,29 |
| Papua Barat | 45,84 | 32,63 | 56,05 | 22,89 | 21,38 | 5,79 | 8,24 |
| Papua | 65,76 | 21,65 | 54,03 | 12,45 | 25,36 | 7,89 | 6,40 |
| **INDONESIA** | **50,34** | **51,19** | **69,51** | **33,96** | **12,12** | **8,32** | **11,51** |

**Lampiran 4 :**
Dokumen Kebijakan Lain yang Terkait dalam Penyusunan RAD MDGs

| NO | TUJUAN MDGs | DOKUMEN YANG DIRUJUK |
|---|---|---|
| 1 | Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan | • PP No. 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja<br>• Perpres No. 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan<br>• Permendagri No. 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota<br>• Rencana Aksi Pangan dan Gizi 2011-2015<br>• Perencanaan Tenaga Kerja Nasional (PTKN)<br>• Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) |
| 2 | Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua | • UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen<br>• Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota |
| 3 | Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | • UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik<br>• Perpres No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan<br>• Inpres No. 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional<br>• Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah<br>• PMK No. 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010<br>• PMK No. 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011 |
| 4 | Tujuan 4 : Mengurangi Angka Kematian Anak | • Pedoman Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) |
| 5 | Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu | • UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga<br>• Rancang Bangun Penurunan AKI<br>• Strategi *Making Pregnancy Safer* (MPS) |
| 6 | Tujuan 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB) | • Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014<br>• Strategi STOP TB<br>• Strategi Gebrak Malaria |

| NO | TUJUAN MDGs | DOKUMEN YANG DIRUJUK |
|---|---|---|
| 7 | Tujuan 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup | • UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya<br>• UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman<br>• UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi UU<br>• UU No. 7 Tahun 2004 Tentang sumber daya air<br>• UU No. 31 Tahun 2004 dan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan<br>• UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah<br>• UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>• PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa<br>• PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar<br>• PP No. 5 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan<br>• PP No. 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan air minum<br>• PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota<br>• *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR)<br>• Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN PI)<br>• *Indonesia Biodiversity Strategic Acton Plan* (IBSAP)<br>• Kebijakan nasional air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat tahun 2003 |

**Lampiran 5 :** Matrik RAD MDGs

Matriks Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGs

| TUJUAN 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program/Kegiatan | Indikator | | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014/2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| **TARGET 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990 - 2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| **NASIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Kependudukan dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1 | 1.PD | Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif | 34 (1 Pusat dan 33 Provinsi) | 34 (1 Pusat dan 33 Provinsi) | 34 (1 Pusat dan 33 Provinsi) | 34 (1 Pusat dan 33 Provinsi) | 34 (1 Pusat dan 33 Provinsi) | 22.5 | 25.3 | 27.2 | 29.3 | 31.5 | APBN | BKKBN dan BKKBN Provinsi |
| | 1a | TOT bagi pengelola pemberdayaan ekonomi keluarga | - | 66 | 33 | - | - | | | | | | | |
| | 2.PD | Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
| | 2a | Pelatihan untuk pendampingan kelompok UPPKS | | | | | | | | | | | | |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1** | - | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2** | - | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | | |

**Keterangan:**

Kegiatan pada tingkat daerah (Provinsi) dikluster dalam kegiatan Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi.

P= Pusat; D=Daerah/Provinsi; P-D= Pusat-Daerah

## TUJUAN 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

| Program/Kegiatan/ Tindakan | Indikator | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| **TARGET 1B : Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda** | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator MDGs :** | **1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja** | | | | | | | | | | | | |
| | **2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas** | | | | | | | | | | | | |
| | **3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja** | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| Kerangka Kebijakan Nasional | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,0-6,3 | 6,4-6,9 | 6,7-7,4 | 7,0-7,7 | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan Investasi (%) | 7,9-10,9 | 8,4-11,5 | 10,2-12,0 | 11,7-12,1 | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%) | | | | | | | | | | | | |
| | - Pertanian | 3,4-3,5 | 3,5-3,7 | 3,6-3,8 | 3,7-3,9 | | | | | | | | |
| | - Industri Pengolahan | 5,9-5,4 | 5,7-6,5 | 6,2-6,8 | 6,5-7,3 | | | | | | | | |
| | -Lainnya | 7,0-7,3 | 7,3-7,7 | 7,5-8,4 | 7,8-8,6 | | | | | | | | |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 7,3-7,4 | 6,7-7,0 | 6,0-6,6 | 5,0-6,0 | | | | | | | | |
| **Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| Kerangka Kebijakan Daerah | Pertumbuhan Ekonomi (%) | | | | | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan Investasi (%) | | | | | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%) | | | | | | | | | | | | |
| | - Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| | - Industri Pengolahan | | | | | | | | | | | | |
| | -Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | | | | | | | | | | | | |

**Kolom Program/Kegiatan diisi oleh daerah dengan mempertimbangkan :**

1. Program/kegiatan yang erat kaitannya dengan upaya mendorong peningkatan investasi di daerah, baik dalam kerangka kebijakan maupun anggaran
2. Program/kegiatan yang dapat memfungsikan peran seluruh lembaga pelatihan di daerah, misalnya lembaga-lembaga pelatihan di tingkat daerah termasuk pelatihan keterampilan calon pekerja di daerah
3. Program/kegiatan yang memberikan peluang pekerjaan dan menciptakan kesempatan kerja seperti padat karya produktif, pembangunan infrastruktur sederhana, pengembangan UMKM, dan lain-lain, yang dilakukan di daerah

Program/kegiatan kemudian dirinci kedalam indikator, target, alokasi, sumber pendanaan dan pelaksana di daerah

## TUJUAN 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

| Program/Kegiatan/ Tindakan | Indikator | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| TARGET 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator MDGs : | 1. Prevalensi balita kekurangan gizi | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum | | | | | | | | | | | | |
| Nasional | | | | | | | | | | | | | |
| Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pembinaan Gizi Masyarakat | 1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 536.0 | 564.0 | 643.0 | 668.0 | - | APBN | Kementerian Kesehatan |
| | 2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) | 70 | 75 | 80 | 85 | - | | | | | | | |
| Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Kagiatan 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Kagiatan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |

## Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

| Program/ Kegiatan | Indikator | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Indikator MDGs: | 1. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar pada tahun 2015 sebesar 100 persen | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar pada tahun 2015 sebesar 100 persen | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki pada tahun 2015 sebesar 100 persen | | | | | | | | | | | | |
| **NASIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1:** Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD | APM SD/SDLB | 84.74% | 85.10% | 85.19% | 85.36% | - | 1,619.1 | 2,394.5 | 2,929.2 | 3,537.1 | - | APBN | Kementerian Pendidikan Nasional |
| **Kegiatan 2:** Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas | Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS | ######### | ######### | ######### | ######### | - | ####### | ####### | ####### | ####### | - | APBN | Kementerian Pendidikan Nasional |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Pendidikan Islam** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1:** Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah | APM MI | 10.56% | 10.60% | 10.61% | 10.64% | - | 2,322.7 | 2,792.7 | 3,146.2 | 3,760.7 | - | APBN | Kementerian Agama |
| **Kegiatan 2:** Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu | Siswa MI penerima BOS | 3,431,289 | 3,482,758 | 3,535,000 | 3,588,025 | - | 3,624.0 | 3,669.0 | 3,715.0 | 3,762.0 | - | APBN | Kementerian Agama |
| **Kegiatan 3:** Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu | Siswa Diniyah Ula Penerima BOS | 195,630 | 198,564 | 201,543 | 204,566 | - | 321.2 | 326.0 | 330.9 | 335.8 | - | APBN | Kementerian Agama |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Sekretariat Jenderal Kemendiknas** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1:** Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah serta Pembinaan | Persentase Buku Ajar jenjang SD yang dibeli hak ciptanya - Total 78 Mata Pelajaran | 100% | - | - | - | - | 117.7 | 122.1 | 126.1 | 130.3 | - | APBN | Kementerian Pendidikan Nasional |
| **Kegiatan 2:** Peningkatan Kapasitas Manajemen Bagi Pendidikan Dasar | Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui Dewan Pendidikan | meningkat | meningkat | meningkat | meningkat | - | 253.1 | 264.5 | 275.0 | 286.0 | - | APBN | Kementerian Pendidikan Nasional |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1:** Penyediaan Sistem dan Kurikulum Belajar-Mengajar | Persentase penerapan kurikulum sekolah yang disempurnakan | 15.0% | 25.0% | 65.0% | 100.0% | - | 63.1 | 67.1 | 71.0 | 77.3 | - | APBN | Kementerian Pendidikan Nasional |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1:** Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi jenjang Sekolah Dasar | Persentase kepala SD/MI yang mengikuti Pelatihan Kepala Sekolah | 25% | 45% | 70% | 90% | - | 79.3 | 86.6 | 94.8 | 103.5 | - | APBN | Kementerian Pendidikan Nasional |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

## Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

| PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR | | TARGET | | | | | | ALOKASI ANGGARAN | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| **Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator MDGs:** | **3.1.** | **Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah atas dan perguruan tinggi** | | | | | | | | | | | | | |
| | **-** | **Rasio APM perempuan/laki-laki di SD** | | | | | | | | | | | | | |
| | **-** | **Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP** | | | | | | | | | | | | | |
| | **-** | **Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA** | | | | | | | | | | | | | |
| | **-** | **Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.1a** | **Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.2** | **Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian** | | | | | | | | | | | | | |
| | **3.3** | **Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional dan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD | | Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada SD/SDLB | >0,98 | >0,98 | >0,98 | 1 | 1 | 1 | 1153.5 | 1619.1 | 2394.5 | 2929.2 | 3537.1 | APBN | Kemdiknas |
| Kegiatan 2: Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP | | Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada SMP/SMPLB | >0,97 | >0,97 | >0,98 | 1 | 1 | 1 | 1687.6 | 2185.4 | 2515.4 | 2936.2 | 3360.0 | APBN | Kemdiknas |
| **Program Pendidikan Menengah** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA | | Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada SMA/SMK/SMLB | >0,80 | >0,85 | >0,85 | >0,90 | 1 | 1 | 988.9 | 1290.0 | 1353.7 | 1409.5 | 1488.5 | APBN | Kemdiknas |
| **Program Pendidikan Tinggi** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Akademik Program Studi | | Rasio APK peserta didik perempuan/laki-laki di PT | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 2885.8 | 2991.3 | 3195.6 | 3396.6 | 3609.8 | APBN | Kemdiknas |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan | | Rasio guru perempuan:laki-laki yang bersertifikat pendidik | 60.00% | 68.00% | 75.00% | 85.00% | 95.00% | 95.00% | 5134.2 | 7624.4 | 11634.4 | 16485.5 | 24222.9 | APBN | Kemdiknas |
| **Program Pendidikan Nonformal dan Informal** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat | | Rasio kesetaraan gender penuntasan buta aksara | 97,6 | 97,8 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | | | | | | APBN | Kemdiknas |
| **Program Pendidikan Islam** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional dan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah | | Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI | >0,98 | >0,98 | >0,98 | 1 | 1 | 1 | 1,464.6 | 2,103.3 | 2,578.7 | 2,938.5 | 3,566.6 | APBN | Kemenag |
| Kegiatan 2: Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah | | Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs | >0,97 | >0,97 | >0,98 | 1 | 1 | 1 | | | | | | APBN | Kemenag |
| Kegiatan 3: Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah | | Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MA | >0,8 | >0,85 | >0,9 | >0,9 | 1 | 1 | 1,089.1 | 1,112.6 | 1,246.2 | 1,345.8 | 1,547.7 | APBN | Kemenag |
| Kegiatan 4: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam | | Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada PTA | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | 1,572.6 | 1,689.6 | 1,943.0 | 2,234.4 | 2,569.6 | APBN | Kemenag |
| **Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional dan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah | | Rasio guru perempuan : laki-laki yang bersertifikat pendidik di madrasah | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 85% | 6,004.8 | 7,565.0 | 9,085.5 | 11,087.9 | ####### | APBN | Kemenag |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional dan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak | | Jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan norma kerja perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 990 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | 15.0 | 18.6 | APBN | Kemnakertrans |
| **Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional dan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Lembaga perwakilan dan partisipasi politik | | Jumlah paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 11.47 | 16.12 | 13.84 | 14.05 | 13.05 | APBN | Kemendagri (Ditjen Kesbangpol) |
| Kegiatan 2: Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/ publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih | 1. | Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 37.50 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | APBN | Komisi Pemilihan Umum (KPU) |
| | 2. | Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | | | | | | APBN | |
| | 3. | Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik | - | 100 | 150 | 200 | 50 | 500 | | | | | | APBN | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional dan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1: Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender | 1. | Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | APBN | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2. | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | K/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | |
| | | prov | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 19 | | | | | | | |
| | 3. | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | K/L | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | prov | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | | | | | | | |
| | 4. | Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa | 1 | - | - | - | - | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegiatan 2: Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan | 1. | Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | APBN | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2. | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan | | | | | | | | | | | | | |
| | | K/L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | prov | 7 | 7 | 6 | 6 | 17 | 33 | | | | | | | |
| | 3. | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang politik dan pengambilan keputusan | | | | | | | | | | | | | |
| | | K/L | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | prov | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | | | | | | | |
| | 4. | Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang politik | 1 | - | - | - | - | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegiatan 3: Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender | 1. | Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 4.0 | 4.3 | APBN | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2. | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | K/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | prov | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | | | | | | | |
| | 3. | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | |
| | | K/L | - | - | - | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | prov | 2 | 2 | 2 | | 9 | 23 | | | | | | | |
| Kegiatan 4: Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 1. | Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | APBN | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | 2. | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | | | | | | | | | | | | | |
| | | K/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | prov | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | | | | | | | |
| | 3. | Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan | | | | | | | | | | | | | |
| | | K/L | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | prov | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 7 | | | | | | | |
| **Program** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## TUJUAN 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak

| Program/Kegiatan/Tindakan | Indikator | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| **TARGET 4A : Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015** | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator MDGs :** | 1. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1:** Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak | 1.Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) | 86 | 88 | 89 | 90 | - | 370.0 | 402.0 | 418.0 | 433.0 | - | APBN | Kementerian Kesehatan |
| | 2.Cakupan pelayanan kesehatan bayi | 85 | 86 | 87 | 90 | - | | | | | | | |
| | 3.Cakupan pelayanan kesehatan anak balita | 80 | 81 | 83 | 85 | - | | | | | | | |
| **Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2** | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |

## TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

| Program/Kegiatan/ Tindakan | Indikator | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| **TARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015** | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator MDGs :** | **1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup** | | | | | | | | | | | | |
| | **2. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih** | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1 : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi** | 1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) | 86 | 88 | 89 | 90 | - | 490.0 | 520.0 | 537.0 | 547.0 | - | APBN | Kementerian Kesehatan |
| | 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) | 88 | 90 | 93 | 95 | - | | | | | | | |
| | 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar | 40 | 75 | 90 | 100 | - | | | | | | | |
| | 4. Presentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi dasar (PONED) | 70 | | | | | | | | | | | |
| | 5. Presentase RS kabupaten/ kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) | 85 | | | | | | | | | | | |
| **Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kagiatan 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2** | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |

## TUJUAN 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

| Program / Kegiatan | | Indikator | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| **TARGET 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator MDGs:** | **1.** | **Angka pemakaian kontrasepsi/ *contraceptive prevalence rate* (CPR)**<br>**CPR cara modern pada wanita usia 15-49 tahun** | | | | | | | | | | | | |
| | **2.** | **Angka kelahiran pada remaja (per 1000 perempuan usia 15-19 tahun)** | | | | | | | | | | | | |
| | **3.** | **Cakupan pelayanan antenatal (K1 dan K4)** | | | | | | | | | | | | |
| | **4.** | ***Unmet need* KB** | | | | | | | | | | | | |
| **Program Kependudukan dan Keluarga Berencana** | | | | | | | | | | | | | | |
| **NASIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1:** Pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta | 1. | Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 533.1 | 979.5 | 963.1 | 941.6 | 960.9 | APBN | BKKBN |
| | 2. | Jumlah peserta KB baru miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera I/KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pelayanan serta mendapatkan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta) | 3.75 | 3.8 | 3.89 | 3.97 | 4.05 | | | | | | | |
| | **Pusat** | | | | | | | | | | | | | |
| | 2aP | Pemberian alat dan obat kontrasepsi/alokon gratis bagi peserta KB baru miskin | 3.75 | 3.8 | 3.89 | 3.97 | 4.05 | | 748.2 | 885.7 | 787 | 798.5 | APBN (DIPA PUSAT) | BKKBN Pusat |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | 2aD | Pelayanan bagi peserta KB baru miskin | 3.75 | 3.8 | 3.89 | 3.97 | 4.05 | | 141.3 | 167.3 | 149.6 | 152.7 | APBN (DIPA PUSAT) | BKKBN Provinsi |
| | 2bD | Penggerakan MOP, MOW, dan IUD | MOP 11.945, MOW 21.600, IUD 600.200 | MOP 12.945, MOW 27.680, IUD 607.200 | MOP 12.480, MOW 26.330, IUD 642.870 | MOP 12,787, MOW 27.063, IUD 621.524 | MOP 13.420, MOW 28.022, IUD 651.808 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Provinsi | Badan KB Provinsi |
| | **- Kab/Kota** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Kab/ Kota | Badan KB Kab/Kota |
| | 3. | Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta) | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 533.1 | 979.5 | 963.1 | 941.6 | 960.9 | APBN | BKKBN |
| | **Pusat** | | | | | | | | 748.2 | 885.7 | 787 | 798.5 | APBN (DIPA PUSAT) | BKKBN Pusat |
| | 3aP | Pembinaan dan pemberian alokon gratis bagi peserta KB aktif miskin | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | | | | | | | |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | 3aD | Pembinaan bagi peserta KB aktif miskin | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | | 141.3 | 167.3 | 149.6 | 152.7 | APBN (DIPA PUSAT) | BKKBN Provinsi |
| | 3bD | Persentase komplikasi berat yang dilayani | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3cD | Persentase kegagalan KB yang dilayani | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |
| | 3dD | Jumlah pencabutan implant yang dilayani (kasus) | 297,600 | 356,048 | 373,580 | 392,543 | 412,170 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Provinsi | Badan KB Provinsi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Kab/Kota** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Kab/ Kota | Badan KB Kab/Kota |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Pusat dan Daerah/Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.PD. | Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | | 748,2 (P) | 885,7 (P) | 787 (P) | 798,5 (P) | APBN (DIPA PUSAT) | BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi |
| | 4a.PD. | Penyediaan perlengkapan klinik KB | | | | | | | 141,3 (D) | 167,3 (D) | 149,6 (D) | 152,7 (D) | | |
| | | - IUD Kit | 168 | 3,612 | 2,520 | 1,260 | 840 | | | | | | | |
| | | - Obgyn Kit | 100 | 393 | 343 | 388 | 342 | | | | | | | |
| | | - Implant Kit | 249 | 5,355 | 3,736 | 1,868 | 1,245 | | | | | | | |
| | | - VTP Kit | 37 | 795 | 554 | 277 | 185 | | | | | | | |
| | | - Minilap | 38 | 817 | 570 | 285 | 190 | | | | | | | |
| | | - Laparoscopy | 40 | 139 | 137 | 137 | 137 | | | | | | | |
| | | - Auto Clave plus tromol | 388 | 8,334 | 5,814 | 2,907 | 1,938 | | | | | | | |
| | | - Dry Sterilisator | 100 | 100 | 50 | 100 | 1,938 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Konseling/KIE Kit | 400 | 8,606 | 6,004 | 3,002 | 2,001 | | | | | | | |
| | | - ABPK | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | | | | | | | |
| **DAERAH** | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **- Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Provinsi | Badan KB Provinsi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Kab/Kota** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Kab/ Kota | Badan KB Kab/Kota |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kegiatan 2:** Peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggara program KB di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta dalam rangka pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB | **Pusat dan Daerah/Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.PD | Persentase tenaga pelayanan KB terlatih di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (Provinsi) | 35 | 45 | 75 | 90 | 100 | 22.6 | 247.0 | 183.9 | 109.3 | 84.1 | APBN (DIPA PUSAT) | BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi |
| | 1a.PD | Dokter (16.934 dokter umum dan 3.918 SPOG) | | 45% (7.620 dokter umum dan 1.763 SPOG) | 75% (12.701 dokter umum dan 2.939 SPOG) | 90% (15.241 dokter umum dan 3.526 SPOG) | 100% (916.934 dokter umum dan 3.918 SPOG) | | 17,7 (P) | 13,2 (P) | 7,8 (P) | 6,0 (P) | | |
| | 1b.PD | Bidan (48.621) | | 45% (21.879 bidan) | 75% (36.466 bidan) | 90% (43.759 bidan) | 100% (48.621 bidan) | | 229,3 (D) | 170,7 (D) | 101,4 (D) | 78,1 (D) | | |
| | 2.PD | Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta) | 20 | 35 | 50 | 70 | 85 | | | | | | | |
| | 2a.PD | Pelatihan Teknis bagi tenaga penyelenggara Pelayanan KB di 23.500 Klinik KB | | | | | | | | | | | | |
| | 2a1 | Pelatihan teknis bagi Dokter | 571 | 12,248 | 8,546 | 4,273 | 2,849 | | | | | | | |
| | 2a2 | Pelatihan teknis bagi Bidan | 1687 | 36274 | 25307 | 12654 | 8435 | | | | | | | |
| | 2a3 | Pelatihan RR bagi Petugas Klinik | - | 17304 | 12073 | 6036 | 4024 | | | | | | | |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Provinsi | Badan KB Provinsi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Kab/Kota** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | APBD Kab/ Kota | Badan KB Kab/Kota |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 3:** Peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) | **Pusat dan Daerah/Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.PD | Persentase pengetahuan remaja tentang : | | | | | | 33.5 | 36.3 | 40.4 | 45.0 | 50.0 | APBN (DIPA PUSAT) | BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi |
| | 1a | Kesehatan reproduksi remaja | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | | 18,5 (P) | 20,6 (P) | 22,9 (P) | 25,5 (P) | | |
| | 1b | HIV/AIDS | 64 | 67 | 70 | 72 | 76 | | 17,8 (D) | 19,8 (D) | 22,1 (D) | 24,5 (D) | | |
| | 1c | Perencanaan kehidupan berkeluarga | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | | | |
| | 2.PD | Jumlah pelatih PKBR dilatih | - | 115 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| | 2a | TOT bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya | | | | | | | | | | | | |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Provinsi | Badan KB Provinsi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Kab/Kota** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Kab/ Kota | Badan KB Kab/Kota |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.D | Jumlah *center of excellent* PKBR (per provinsi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 17.8 | 19.8 | 22.1 | 24.5 | APBN (DIPA PUSAT) | BKKBN Provinsi |
| | 3a | Pengembangan CoE | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | | | | | | | |
| | 4.D | Jumlah PIK remaja/ mahasiswa yang dibentuk dan dibina | 9,373 | 12,253 | 13,195 | 14,140 | 15,016 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4a | Pembentukan dan pengembangan PIK Remaja/ Mahasiswa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Provinsi | Badan KB Provinsi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Kab/Kota** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Kab/ Kota | Badan KB Kab/Kota |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 4:** Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB | **Pusat dan Daerah/Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.PD | Persentase media dan materi KIE yang diproduksi | 38 | 65 | 84 | 100 | 100 | 34.9 | 302.0 | 246.1 | 203.1 | 172.7 | APBN (DIPA PUSAT) | BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi |
| | 1a | Pengembangan isi pesan KIE | | 34 | 34 | 34 | 34 | | 136,1 (P) | 182,7 (P) | 121,7 (P) | 103,6 (P) | | |
| | 1b | Penayangan informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | | | | | | | |
| | 1c | Penyediaan materi KIE KB di Klinik KB | - | 8930 klinik | 6345 klinik | 4465 klinik | 3760 klinik | | 90,9 (D) | 44,2 (D) | 31,3 (D) | 22,2 (D) | | |
| | 1d | Pengembangan jejaring KIE | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | | | | | | |
| | 2.PD | Persentase pasangan usia subur (PUS), wanita usia subur (WUS), dan remaja yg mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | | |
| | 2a | Penyediaan KIE-Kit bagi PLKB | - | 380 unit | 270 unit | 190 unit | 160 unit | | | | | | | |
| | 2b | Pendayagunaan MUPEN | 33 prov | 33 prov | 33 prov | 33 prov | 33 prov | | | | | | | |
| | 2c | Pelatihan teknis pengoperasian MUPEN | - | 701 petugas | 553 petugas | 330 petugas | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Provinsi | Badan KB Provinsi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Kab/Kota** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Kab/ Kota | Badan KB Kab/Kota |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 5:** Peningkatan peran serta LSM, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program KKB | **Pusat dan Daerah/Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.PD | Jumlah tenaga lini lapangan KB (PLKB/PKB) yang terlatih: | | | | | | 29.4 | 61.3 | | 58.8 | 56.8 | APBN (DIPA Pusat) | BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi |
| | | a. Latihan dasar umum (LDU) | 1,065 | 1,343 | 1,342 | - | - | | 5,3 (P) | 5,4 (P) | 5,0 (P) | 4,9 (P) | | |
| | | b. *Refreshing* | 1,350 | 2,500 | 2,750 | 2,700 | 1,700 | | 56,1 (D) | 58.1 | 53.8 | 51.9 | | |
| | | c. Pelatihan teknis | 3,018 | 3,300 | 3,450 | 2,157 | 950 | | | | | | | |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Provinsi | Badan KB Provinsi |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Kab/Kota** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APBD Kab/ Kota | Badan KB Kab/Kota |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 6:** Peningkatan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1 | **Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Provinsi** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.D | Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang menjadi peserta KB mandiri | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 110,000 | | 11.8 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | APBN (DIPA Pusat) | BKKBN Provinsi |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | APBD Provinsi | Badan KB Provinsi |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Kab/Kota** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | APBD Kab/ Kota | Badan KB Kab/Kota |
| | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan: Kegiatan pada tingkat daerah/provinsi yang bersumber dari dana APBN dikluster dalam kegiatan Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi.

## TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)

| Program/Kegiatan/ Tindakan | Indikator | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| **TARGET 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015** | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator MDGs** | **1. Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun** | | | | | | | | | | | | |
| | **2. Penggunaan kondom pada hubungan seks terakhir** | | | | | | | | | | | | |
| | **3. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS** | | | | | | | | | | | | |
| | **4. Rasio kehadiran anak yatim piatu di sekolah terhadap anak bukan yatim piatu (usia 10-14 tahun)** | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1 :** Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1 :** Pengendalian Penyakit Menular Langsung | 1. Prevalensi kasus HIV | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | - | 265 | 293.0 | 298.0 | 307.0 | - | APBN | Kementerian Kesehatan |
| | 2. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS | 75 | 85 | 90 | 95 | - | | | | | | | |
| | 3. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | - | | | | | | | |
| | 4. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman | 60 | 70 | 80 | 100 | - | | | | | | | |
| | 5. Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai) | 35 (Perempuan) 20 (Laki-laki) | 45 (Perempuan) 30 (Laki-laki) | 55 (Perempuan) 40 (Laki-laki) | 65 (Perempuan) 50 (Laki-laki) | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2** | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010** | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator MDGs** | 1. Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1 :** Pengendalian Penyakit Menular Langsung | 1. Persentase ODHA yang mendapatkan *Anti Retroviral Treatment* (ART) | 75 | 80 | 85 | 90 | - | 265 | 293.0 | 298.0 | 307.0 | - | APBN | Kementerian Kesehatan |
| **Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2** | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 2 : Pembinaan Upaya Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1** : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | 1. Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 79 | 80.0 | 94.0 | 106.0 | - | APBN | Kementerian Kesehatan |
| **Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2** | | | | | | | | | | | | | |
| **dst** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (TB) hingga tahun 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indikator MDGs** | 1. Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun) | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate) | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1 :** Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 : Pengendalian Penyakit Menular Langsung | 1. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk | 231 | 228 | 226 | 224 | - | 265.0 | 293.0 | 298.0 | 307.0 | - | APBN | Kementerian Kesehatan |
| | 2. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan | 75 | 80 | 85 | 90 | - | | | | | | | |
| | 3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan | 86 | 87 | 87 | 88 | - | | | | | | | |
| **Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2** | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2 : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang** | **Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk** | **1,75** | **1,5** | **1,25** | **1** | **-** | **177.4** | **297.0** | **303.0** | **311.0** | **-** | **APBN** | **Kementerian Kesehatan** |
| **Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2** | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |

**TUJUAN 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

| PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS | | INDIKATOR | TARGET PENCAPAIAN | | | | | | ALOKASI ANGGARAN | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/ 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| **Tujuan 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tujuan 7B : Mengurangi kehilangan keanekaragaman hayati, dan mengurangi kehilangan yang signifikan pada 2015** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator MDGs:** | **7.1** | **Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.2** | **Jumlah emisi karbon dioksida (CO2e)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.3** | **Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.4** | **Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.5** | **Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan** | | | | | | | | | | | | | |
| | **7.6** | **Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Sasaran** | a. | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan | 52,43 (2008) | | | | | Meningkat | | | | | | | |
| | b. | Jumlah emisi karbon dioksida (CO2e) | 1.711.626Gg CO2e (2008) | | | | | Menurun 26% dari BAU (2020) | | | | | | | |
| | c. | Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton | CFC = 0 (2009) | | | | | HCFC berkurang 10% | | | | | | | |
| | d. | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | 91,83 (2008) | | | | | kurang dari 80% MSY | | | | | | | |
| | e. | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | 29,31 (2010) | | | | | Meningkat | | | | | | | |
| | f. | Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial: | 4.35 (2009) | | | | | Meningkat | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional dan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | 1 | Jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim | | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 26.5 | APBN | KLH |
| | 2 | % penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO | | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | |
| | 4 | % penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | % pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC | | 1% | 2% | 3% | 10% | 10% | | | | | | | | |
| | 6 | Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | | | | | | | | |
| | 7 | Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | |
| | 8 | Implementasi konsep Program Kampung Iklim | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional dan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis | 1 | kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha | 900 ribu ha | 900 ribu ha | 900 ribu ha | 900 ribu ha | 900 ribu ha | Meningkat | | 73.5 | 109.8 | 151.2 | 190.2 | 220.7 | APBN | KKP |
| | 2 | Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat. | 9 Kawasan dan 3 jenis | 9 Kawasan dan 3 jenis | 9 Kawasan dan 3 jenis | 9 Kawasan dan 3 jenis | 9 Kawasan dan 3 jenis | Meningkat | | | | | | | | |
| **Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional dan Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) | 1 | Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI (prov) | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | 37.5 | 53.4 | 71.4 | 88.4 | 103.9 | APBN | KKP |
| | 2 | Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | | | | | | | | |
| | 3 | Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya | 1 WPP | 11 WPP 33 prov | 11 WPP 33 prov | 11 WPP 33 prov | 11 WPP 33 prov | 11 WPP 33 prov | | | | | | | | |
| | 4 | Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya (prov) | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | meningkat | | | | | | | | |

**TUJUAN 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup**

| Program/ Kegiatan/ Tindakan | Indikator | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| **TARGET 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015** | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator MDGs** | **1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan perdesaan)** | | | | | | | | | | | | |
| | **2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (perkotaan dan perdesaan)** | | | | | | | | | | | | |
| **Nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program 1 : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1 : Penyehatan Lingkungan** | 1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas | 62,5 | 63 | 63,5 | 67 | - | 373.0 | 379.0 | 447.0 | 499.0 | - | APBN | Kementerian Kesehatan |
| | 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat | 90 | 95 | 100 | 100 | - | | | | | | | |
| | 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat | 67 | 69 | 72 | 75 | - | | | | | | | |
| | 4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 5,500 | 11,000 | 16,000 | 20,000 | - | | | | | | | |
| **Daerah** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2** | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |

**TUJUAN 7C: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

| Program/Kegiatan | Indikator | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran (Rp miliar) | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| **TARGET 7C : Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi dasar pada 2015** | | | | | | | | | | | | | |
| **NASIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** | | | | | | | | | | | | | |
| Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan | Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem *off site* dan *on-site* (kab/kota) | 93 kawasan | 11 kab/ kota sistem off-site; 40 kab/kota sistem on-site | 11 kab/ kota sistem off-site; 50 kab/kota sistem on-site | 11 kab/ kota sistem off-site; 55 kab/kota sistem on-site | | 953.2 | 1,076.0 | 957.0 | 1,672.0 | | | Kemen PU |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2** | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |
| **NASIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** | | | | | | | | | | | | | |
| Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Jumlah desa, kawasan MBR perkotaan,IKK, dan kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET) yang terfasilitasi | 1.283 desa 81 kawasan MBR 170 IKK 23 kawasan khusus 10 pelabuhan perikanan | 500 desa 100 kawasan MBR perkotaan 160 IKK 20 kawasan khusus 10 kawasan pelabuhan perikanan | 700 desa 140 kawasan MBR perkotaan 175 IKK 20 kawasan khusus 10 kawasan pelabuhan perikanan | 813 desa 173 kawasan MBR perkotaan 187 IKK 22 kawasan khusus 10 kawasan pelabuhan perikanan | | 2,855.7 | 1,880.0 | 2,304.0 | 3,147.0 | | | Kemen PU |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kegiatan 2** | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | |

**TUJUAN 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup**

| Program/Kegiatan | Indikator | Target Pencapaian | | | | | Alokasi Anggaran (Rp miliar) | | | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| **TARGET 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020** | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator MDGs:** | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | | | | | | | | | | | | |
| **NASIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** | | | | | | | | | | | | | |
| Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman | Kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani | 112 | 30 | 30 | 22 | | 74.0 | 75.0 | 66.0 | 45.0 | | APBN | Kemen PU |
| | Satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya | 70 Twin Blok | 140 Twin Blok | 0 | 0 | | 997.0 | 900.0 | 400.0 | 200.0 | | APBN | |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | | | | | | |
| **NASIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman** | | | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh | Jumlah permukiman kumuh yang terfasilitasi (Ha) | 100 | 150 | 175 | 180 | | 160.0 | 240.0 | 280.0 | 288.0 | | APBN | Kemenpera |
| **DAERAH** | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 2 | | | | | | | | | | | | | |
| dst. | | | | | | | | | | | | | |

## MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN MDG 4 (KOMPONEN KETENAGAAN)

Unit : Badan PPSDMK (Pusrengun SDMK)

| No | Kegiatan | Indikator | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **Nasional** | | | | | | | |
| | | **INPRES NO 3 TAHUN 2010** | | | | | |
| | | **tersusunnya pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis, mencakup jml, jenis, dan lokasi penempatannya** | | | | | |
| | | **ditetapkannya Perpres tentang penempatan tenaga kesehatan strategis di puskesmas dan RS Kab/ Kota** | | | | | |
| | | **penempatan tenaga kesehatan strategis terutama dokter, bidan dan perawat terutama di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah bermasalah kesehatan dan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan sesuai formasi yang tersedia (%)** | | | | | |
| **Daerah** | | | | | | | |
| | **Kegiatan 1.** | **1. Tersusunnya pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis, mencakup jml, jenis, dan lokasi penempatannya** | | | | | |
| | Sub kegiatan 1a.<br>Advocacy pembentukan unit fungsional perencanaan SDM kesehatan | Provinsi : Jumlah Kab/Kota yang memiliki unit fungsional perencanaan SDM Kesehatan yang terbentuk | | | | | |
| | Sub kegiatan 1b.<br>Pelatihan Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan pemerintah di Kab/ Kota | Jumlah tenaga perencana SDM Kesehatan yang dilatih | | | | | |
| | Sub kegiatan 1c<br>. Pemetaan kebutuhan SDM kesehatan di tingkat Kab/Kota (jumlah, jenis dan lokasi penempatan) | Provinsi : Jumlah Kab/Kota yang memiliki peta kebutuhan SDM Kesehatan | | | | | |
| | Sub kegiatan 1d.<br>Pengusulan rencana kebutuhan nakes strategis melalui formasi di saryankes pemerintah Kab/Kota | Jumlah formasi nakes strategis yang diusulkan | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kegiatan 1.** | **2. Ditetapkannya Perpres tentang penempatan tenaga kesehatan strategis di puskesmas dan RS Kab/ Kota** | | | | | |
| | **Sub kegiatan 1a.** | | | | | | |
| | **Kegiatan 1.** | **3. Penempatan tenaga kesehatan strategis terutama dokter, bidan dan perawat terutama di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah bermasalah kesehatan dan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan sesuai formasi yang tersedia (%)** | | | | | |
| | Sub kegiatan 1a.<br>Penempatan nakes strategis di puskesmas DTPK prioritas Kab/Kota melalui penugasan khusus sesuai yang diusulkan | Jumlah nakes strategis yang ditempatkan di puskesmas DTPK prioritas Kab/Kota | | | | | |
| | Sub kegiatan 1b.<br>Penempatan nakes strategis di RSUD Kab/Kota melalui penugasan khusus sesuai yang diusulkan | Jumlah nakes strategis yang ditempatkan di RSUD Kab/Kota | | | | | |
| | sub kegiatan 1c.<br>Peningkatan kompetensi nakes di saryankes Kab/Kota melalui pendidikan berkelanjutan (tugas belajar) bagi nakes strategis (dokter umum, perawat , bidan, dan tenaga gizi) | Jumlah nakes strategis yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan (tugas belajar) | | | | | |
| | Sub kegiatan 1d.<br>Peningkatan kompetensi nakes melalui pelatihan teknis, fungsional, manajemen kesehatan berdasarkan kebutuhan program | Jumlah SDMK yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, manajemen kesehatan berdasarkan kebutuhan program terutama untuk mencapai target MDGs 1C, 4, 5, 6, dan 7C | | | | | |